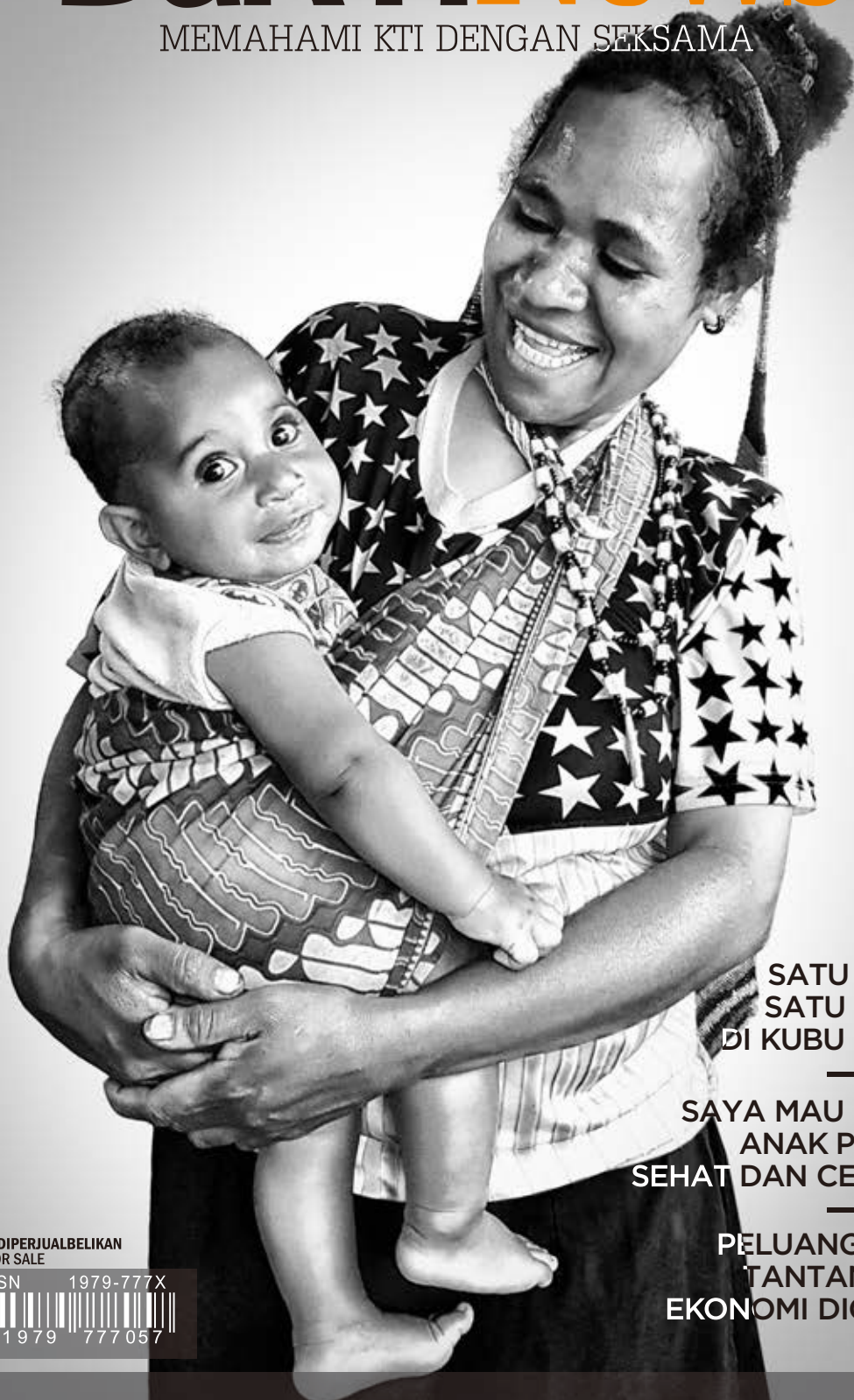


No. 159 April - Mei 2019

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



SATU DESA
SATU PAUD
DI KUBU RAYA

SAYA MAU LIHAT
ANAK PAPUA
SEHAT DAN CERDAS

PELUANG DAN
TANTANGAN
EKONOMI DIGITAL

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU
FADHILAH MANSYUR
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Praktik Cerdas & Info Buku **SUMARNI ARIANTO**
Database & Sirkulasi **INDINA ISBACH**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Editor Foto

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS **BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

Menjadi Pelanggan BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Berkontribusi untuk BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

April- Mei 2019

No. **159**

- 1** Satu Desa Satu PAUD di Kubu Raya
Oleh **AFRIZAL ABDUL RASYID**
- 5** Mampukah UKBI Bersaing dengan TOEFL
Oleh **AYU PUTU EKA NOVITA**
- 9** Philipus Mote :
"Saya Mau Lihat Anak Papua Sehat dan Cerdas"
Oleh **SYAIFULLAH**
- 13** Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Khotbah Jumat
Oleh **BAIQ FALMAYANI INDIRA**
- 17** "Buah Sabar"
Solusi Lingkungan Sehat
Oleh **YULIATI**
- 21** Pengabdian Guru Herlina Silubun Untuk Anak-Anak Asmat (Bagian 2) Selesai
Oleh **PETRUS SUPARDI**
- 25** Membangun Kampung dengan Data
Oleh **FADHILAH MANSYUR**
- 29** Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital
Oleh **MUHAMMAD AULIA Y GUZASIAH**
- 32** Riwayat Danau Tondano, Dulu & Kini
Oleh **DENNI PINONTOAN**
- 36** Apa yang Perlu Diketahui Tentang Dasar-Dasar Feminisme
Oleh **NADYA KARIMA MELATI**
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

■ Foto Cover : **Desy Mutialim/Yayasan BaKTI**





Satu Desa Satu PAUD di Kubu Raya

Oleh **AFRIZAL ABDUL RASYID**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut di kemudian hari.



Foto: Dok. Program Melayani - Yayasan BaKTI

Kualitas seseorang di usia selanjutnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan awal yang diperolehnya pada usia dini.

Pendidikan, dari 118 desa terdapat 51 desa yang belum memiliki PAUD. Pelaksanaan Program Satu Desa Satu PAUD bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Berdasarkan tujuan penyelenggaraan program ini, keberadaan PAUD di setiap desa merupakan hal yang sangat penting, sehingga program Satu Desa Satu PAUD bukan hanya sekedar wacana tetapi dapat terwujud.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki komitmen yang kuat pada penanganan *stunting* melalui peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tak hanya mengurangi *stunting*, hal ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di masa 1.000 hari pertama kehidupan dan usia setelahnya hingga lima tahun merupakan masa emas perkembangan otak anak. Melalui kerjasama lintas sektor secara bersama menanggulangi kasus *stunting* atau kekerdilan fisik dan otak pada anak yang berpotensi merugikan negara di masa mendatang apabila tidak ditangani dengan baik. Penanggulangan *stunting* atau kekerdilan dilakukan dari sektor ketahanan pangan, infrastruktur sanitasi dan air bersih, layanan di fasilitas kesehatan, dan edukasi kepada para orang tua untuk pencegahan *stunting*.

Sebagai salah satu upaya Kabupaten Kubu Raya untuk mencapai satu desa satu PAUD di 118 desa yang ada, pada tanggal 14 Februari 2019 diadakan Workshop Penyelenggaraan Satu Desa Satu PAUD. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pemerintah Desa berdiskusi panjang mengenai tantangan dalam mendirikan atau mengoperasikan PAUD. Menurut aparat desa, sangat sulit dalam pengurusan perizinan. Ada beberapa izin yang sulit dipenuhi oleh desa dalam mendirikan PAUD seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). Sehingga ada PAUD yang telah melangsungkan proses belajar, namun belum mengantongi izin operasional. Akibatnya, PAUD tersebut tidak terdata secara nasional di Dinas Pendidikan, dan

Berdasarkan studi akademik maupun kajian empirik tentang anak usia dini, kualitas seseorang di usia selanjutnya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan awal yang diperolehnya pada usia dini. Para ahli neurosains menemukan bahwa sel-sel otak anak mencapai 100 miliar ketika lahir dan membutuhkan stimulasi yang tepat agar saling berhubungan.

Pemerintah pusat dan daerah tengah gencar menyukseskan Program Satu Desa Satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh desa. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DSPMD) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pembinaan kepada desa-desa yang belum memiliki PAUD atau belum memiliki izin operasional PAUD. Menurut data yang direkapitulasi oleh Dinas



tidak dapat mengakses bantuan dan guru PAUD tidak menerima intensif.

Dalam pendirian PAUD seringkali dilupakan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mengeluarkan izin. Sehingga penting untuk menghadirkan DPMPTSP sebagai pemateri workshop bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa. Melalui penjelasan DPMPTSP diperoleh informasi bahwa khusus untuk pendirian PAUD di Kabupaten Kubu Raya perizinannya dipermudah, tidak melalui *Online Submission System* (OSS), namun dilakukan secara manual yaitu SIMYANDU (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu).

Workshop yang dilaksanakan di Gardenia Resort Kubu Raya ini dihadiri oleh perwakilan camat, 20 kepala desa dan 20 Bunda PAUD Desa yang belum memiliki PAUD atau belum memiliki izin operasional PAUD. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah, Yusran Anizam menegaskan kembali bahwa dari 118 desa di Kabupaten Kubu Raya, terdapat 51 desa yang belum memiliki PAUD atau belum mempunyai izin operasional PAUD. “Ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah mengingat vitalnya peran PAUD dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak usia dini agar siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut di kemudian hari, begitu pula Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya melakukan pembinaan dan advokasi

berkelanjutan kepada desa-desa yang belum memiliki PAUD atau izin operasional PAUD”.

Seiring dengan penetapan *stunting* sebagai program prioritas pembangunan nasional, maka terbuka peluang bagi pemerintah desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dan bersifat skala desa. Hal itu terealisasi dengan APBDes melalui kegiatan-kegiatan intervensi sensitif dan spesifik untuk penanganan *stunting*. Rujukan belanja desa untuk penanganan *stunting* diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

“Peraturan ini memunculkan daftar kegiatan prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain menyebutkan dukungan pembiayaan terhadap sarana prasarana dan pengelolaan PAUD,” tegas Pak Yusran.

Dukungan intervensi pencegahan dan penanganan *stunting* memerlukan kerjasama lintas sektor melalui berbagai pendekatan. Diantaranya edukasi kepada anak dan orang tua melalui PAUD. “Untuk itu peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD menjadi upaya bersama pemerintah pusat dan daerah. Sehingga upaya intervensi pencegahan dan penanganan *stunting* dapat berjalan secara optimal” harapnya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan apresiasi kepada Bank Dunia yang telah melaksanakan pendampingan program Menemukanali Permasalahan Layanan Sosial Dasar di Indonesia (MELAYANI) di Kabupaten Kubu Raya selama sekitar satu setengah tahun.



Kegiatan menemukenali masalah yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah Kubu Raya yang difasilitasi oleh Bank Dunia lewat Program Melayani (kiri) Foto : Dok. Program Melayani/Yayasan BaKTI Arahan sekaligus membuka acara oleh Sekda Kubu Raya, Yusran Anizam (kanan) Foto : Afrizal Abdul Rasyid/Yayasan BaKTI

Pemerintah berharap pelaksanaan workshop ini dapat meningkatkan pemahaman lintas sektor terkait penyelenggaraan PAUD sebagai salah satu bentuk intervensi pencegahan *stunting*. “Diharapkan dapat terbangun komitmen bersama dalam mendorong terselenggaranya dan tersusunnya rencana aksi penyelenggaraan PAUD demi peningkatan kualitas PAUD ke depannya” tutupnya.

Pada workshop ini, perwakilan Kepala Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya menceritakan pengalaman dan pembelajaran dalam hal pendirian PAUD, dimana di desa Sungai Ambangah sudah memiliki 3 PAUD semenjak tahun 2015. Sebelum tahun 2015 Sungai Ambangah tidak memiliki PAUD sama sekali. Diakhir workshop, peserta merumuskan rekomendasi yang akan disepakati bersama untuk kemudian ditindaklanjuti. Setiap peserta yang mewakili instansinya mengusulkan apa yang dapat dilakukan dalam target waktu tertentu untuk mempercepat pendirian satu desa satu PAUD. Berikut adalah kesepakatan yang dihasilkan sebagai rekomendasi dari workshop ini (*lihat tabel disamping*).

RENCANA TINDAK LANJUT

No.	Rencana Kegiatan	Tanggung Jawab pelaksanaan	Target Waktu
1.	Membantu fasilitasi pengurusan perizinan PAUD	Kepala Desa	April 2019
2.	Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dan Pengelolaan PAUD	Kepala Desa	Februari 2019
3.	Melaksanakan kegiatan dukungan intervensi penanganan Stunting melalui PAUD	Kepala Desa	Tahun Anggaran 2019
4.	Mendorong advokasi penyelenggaraan Satu Desa Satu PAUD	Kecamatan	Tahun Anggaran 2019
5.	Mendorong integrasi PAUD-BKB-HI di desa	Ketua TP PKK Desa dan DP3KB	Tahun Anggaran 2019
6.	Mengoptimalkan dan menindaklanjuti proses perizinan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Februari 2019
7.	Mempercepat proses perizinan PAUD bagi pengajuan dengan syarat lengkap	DPMPTSP	Februari 2019
8.	Berkomitmen melaksanakan aturan yang mempermudah dan mempercepat perizinan PAUD	DPMPTSP	Februari 2019
9.	Mengawal dukungan penganggaran bagi PAUD melalui asistensi penyusunan RKP Desa dan APBDes	DSPMD	Februari 2019
10.	Memfasilitasi penyelenggaraan Satu Desa Satu PAUD dan menetapkan sebagai prioritas perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	Maret 2019
11.	Menyiapkan bahan literasi pemantauan tumbuh kembang anak bagi orangtua siswa PAUD	Dinas Kesehatan	Tahun Anggaran 2020
12.	Memberikan pembekalan tentang pemantauan tumbuh kembang anak bagi tenaga pendidik PAUD	Dinas Kesehatan	Februari 2019

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MELAYANI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Mampukah UKBI Bersaing dengan TOEFL

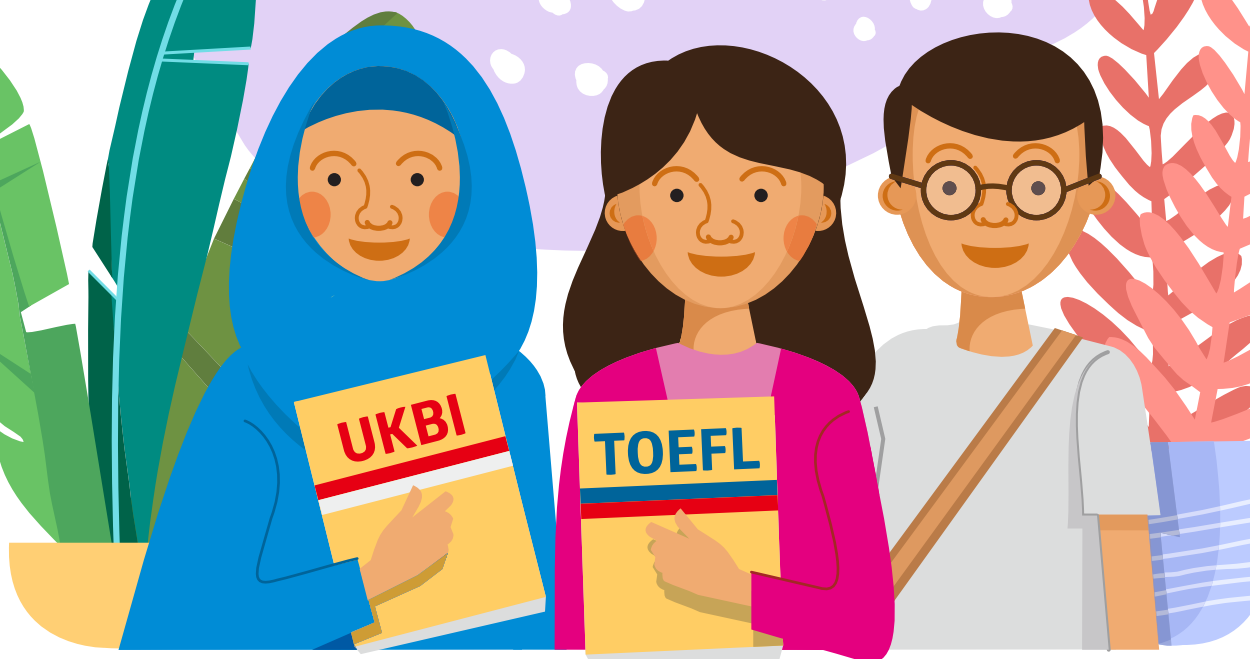
Oleh **AYU PUTU EKA NOVITA**

Pasti tak banyak yang mengetahui apa itu UKBI, dan sangat mengenal TOEFL untuk banyak persyaratan baik itu untuk sekolah, beasiswa, bahkan kenaikan pangkat. Nah mari kita dalami apa itu UKBI dan apa sih kegunaannya.

Mungkin perilaku orang Indonesia yang pemalu memengaruhi juga perilaku Bangsa Indonesia terhadap rasa percaya diri menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang telah diperjuangkan dan diakui sejak 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda oleh para visioner bangsa.

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dengan jumlah penutur keempat terbanyak di Dunia (data 2018, Badan Bahasa) dan rasa kebanggaan itu sangat memengaruhi dan merasuk sanubari, saat melihat bahwa begitu Bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa yang punya potensi untuk memengaruhi banyak negara minimal ASEAN. Bahkan Bahasa Indonesia diangkat sebagai Bahasa Resmi ASEAN sejak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Sehingga Bahasa Indonesia harus punya standar pada kemahiran penuturnya.

“Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.”



Ilustrasi: Ichsan Djunaed

Walaupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah ditetapkan sejak 2015, namun penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN masih kurang efektif dan tampak belum percaya diri untuk tampil sebagai bahasa resmi ASEAN, bahkan cenderung kalah dibandingkan bahasa Inggris akibat pengaruh situasi secara global, sebagaimana bahasa Inggris yang menjadi bahasa resmi masyarakat Uni Eropa.

Berapakah jumlah penutur Bahasa Indonesia dan siapa sajakah mereka? Mungkin pertanyaan itu akan membawa kita lebih dalam melihat bagaimana Bahasa Indonesia dihargai dan dijadikan unggulan, Apakah Bahasa Indonesia dapat bersaing di dunia internasional sebagai

bahasa yang dihargai oleh penuturnya, bukan hanya bahasa lokal yang mencoba mendunia?

Sebagai bahasa yang potensial, Bahasa Indonesia memiliki UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indonesi). UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan dan tulis. Sebagai perangkat yang dijadikan acuan dalam kemahiran berbahasa Indonesia maka UKBI juga akan disetarakan dengan TOEFL sarana uji kemampuan berbahasa Inggris yang digunakan oleh penutur Bahasa Inggris. Apakah UKBI mampu menjadi kebanggaan dan berfungsi dalam pembangunan berbahasa bagi penuturnya? kontribusi dan strategi apa yang dapat dilakukan agar Bahasa Indonesia optimal dalam mendorong MEA?

PENUTUR/PENGGUNAAN UKBI

- Di Amerika Serikat 16 Universitas mengajarkan bahasa Indonesia seperti di Cornell, Harvard, Yale, UC Berkeley dan UCLA.
- Mata kuliah bahasa Indonesia mulai diajarkan di VNU ini pada tanggal 18 Februari 2019 dengan dukungan pengajar dari Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia ini menjadi bagian dari program Asia Tenggara di Fakultas Studi Ketimuran. Ini merupakan implementasi dari MoU antara Vietnam dengan Indonesia pada tahun 2017 ketika Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong berkunjung ke Jakarta.
- Rusia, merupakan negara terlama mempelajari bahasa Indonesia yakni sejak 1955.
- Negara seteru Rusia saat ini yaitu Ukraina (bekas bagian negara Uni Sovyet dulu) juga mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah mereka.
- Australia, bahasa Indonesia menjadi terpopuler ke empat, diajarkan di sekitar 500 sekolah. Sebuah sekolah swasta di Canberra misalnya yaitu Burgmann Anglican School (BAS) pelajaran bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat TK hingga kelas 7. Untuk kelas 8 bahasa Indonesia menjadi bahasa pilihan.

TOEFL

Seluruh dunia, Vista Education berhasil merangkul pentingnya sertifikat TOEFL/IELTS sebagai berikut:

- Digunakan untuk pendaftaran program short course dan non-degree program di negara-negara berbahasa Inggris.
- Digunakan untuk pendaftaran ke program sarjana (S1) dan master kalau kamu ingin kuliah ke luar negeri
- Digunakan untuk pendaftaran dan penempatan dalam program kolaborasi internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.

- Untuk mendaftar program beasiswa ke berbagai negara sebagai seleksi awal.
- Untuk tes masuk program berbahasa Inggris yang membutuhkan bukti kemampuan bahasa Inggris akademik di level sarjana (S1) atau diploma.
- Untuk memonitor perkembangan kemampuan bahasa Inggris khususnya yang memerlukan kecakapan/keahlian dalam bahasa Inggris akademik.
- Untuk menyiasati beasiswa LPDP. Apabila universitas tempat kita akan belajar di luar negeri meminta skor bahasa Inggris yang lebih rendah (misalnya IELTS 6, atau malah 5.5) tetap saja LPDP akan meminta skor TOEFL sebesar 550. Nah, TOEFL ITP ini bisa dipakai.
- TOEFL biasa digunakan sebagai pra syarat (admission requirements) untuk mendaftar ke Sekolah Menengah Atas dan Universitas di dalam dan di luar negeri, juga untuk syarat memperoleh beasiswa.
- TOEFL bagi para pelamar kerja
- Untuk kenaikan jabatan atau promosi.

MATERI

UKBI

- UKBI terdiri atas lima seksi, yaitu Seksi I (Mendengarkan) jumlah 40 soal, 30 menit wacana lisan dalam bentuk 4 dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog terdiri atas 5 butir soal.
- Seksi II (Merespons Kaidah) jumlah soal 25 dengan waktu 20 menit soal tertulis berupa kalimat yang direspon peserta dengan memilih opsi pengganti untuk bagian yang salah.
- Seksi III (Membaca) dalam bentuk soal pilhan ganda jumlah 40 soal, dengan waktu 45 menit, wacana tulis berjumlah 8 wacana. Setiap wacana terdiri atas 5 butir soal.
- Seksi IV (Menulis) dengan waktu 30 menit, soal tertulis berupa permintaan untuk mempresentasikan gambar/diagram/label kedalam wacana tulis 200 kata.

- Dalam bentuk presentasi tulis dan Seksi V (Berbicara) dalam bentuk presentasi lisan, dengan waktu 30 menit soal tertulis berupa permintaan untuk mempresentasikan gambar/diagram/label/ ke dalam wacana tulis 200 kata.

TOEFL

1. Reading

Sesi reading (membaca) terdiri atas 3 hingga 5 bacaan yang masing-masing memuat 700 kata dan diikuti oleh beberapa pertanyaan berkaitan dengan bacaan tersebut.

2. Listening

Sesi listening (mendengarkan) terdiri atas dua percakapan dan empat kuliah atau diskusi akademik. Dalam percakapan akan terdengar ada dua pembicara, yaitu seorang siswa dan seorang profesor atau seorang staf kampus.

3. Speaking

Sesi speaking (berbicara) terdiri atas 6 latihan, yaitu dua latihan bersifat independen dan 4 latihan yang saling berkaitan.

4. Writing

Sesi writing (menulis) mengukur kemampuan peserta tes dalam hal menulis yang terdiri atas dua latihan.

KEBIJAKAN

UKBI

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Penggunaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di masyarakat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- Hak Cipta UKBI tertuang di dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 023993 dan 023994 tertanggal 8 Januari Tahun 2004 dan telah diperbarui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

TOEFL

- Enam Kementerian dan Lembaga prasyaratkan TOEFL untuk rekrutmen baru
- Setiap mahasiswa Universitas Tanjungpura Program Sarjana (S1) Angkatan 2008/2009, 2009/2010 dan 2010/2011 wajib

memiliki skor tes TOEFL Prediction sebagai syarat mengikuti ujian skripsi/tugas akhir di lingkungan Universitas Tanjungpura.

- Kebijakan penggunaan TOEFL ada di semua Perguruan Tinggi Negeri dan swasta untuk menyongsong era globalisasi.

BASISUJIAN

UKBI

- Ujian Kertas masih digunakan untuk keseluruhan Kantor/Balai/Badan Bahasa
- Berbasis Internet namun belum online.

TOEFL

- **PBT atau Paper-Based Test** (yang sekarang dihapus. Kalau pun masih ada, jarang sekali yang masih menggunakannya dan itu pun hanya untuk latihan
- **TOEFL-IBT (Internet Base Test)** yaitu jenis TOEFL yang tesnya menggunakan komputer dan jaringan internet sebagai tempat soal dan jawabannya.
- **TOEFL Versi Lokal oleh Lembaga Kursus / Balai Bahasa.** Dalam hal ini setiap lembaga kursus umum dan balai bahasa perguruan tinggi pada umumnya mempunyai sejenis tes TOEFL versi lokal misalnya ada yang bernama PTSOL, EPT dan ELPT. Yang diujikan sama yaitu kemampuan listening, structure dan reading.

BIAYA

UKBI

Sesuai PNPB (PP 82 tahun 2016)

- Pelajar/Mahasiswa Rp. 135.000
- Masyarakat Umum Rp. 300.000
- Warga Negara Asing Rp. 1.000.000

TOEFL

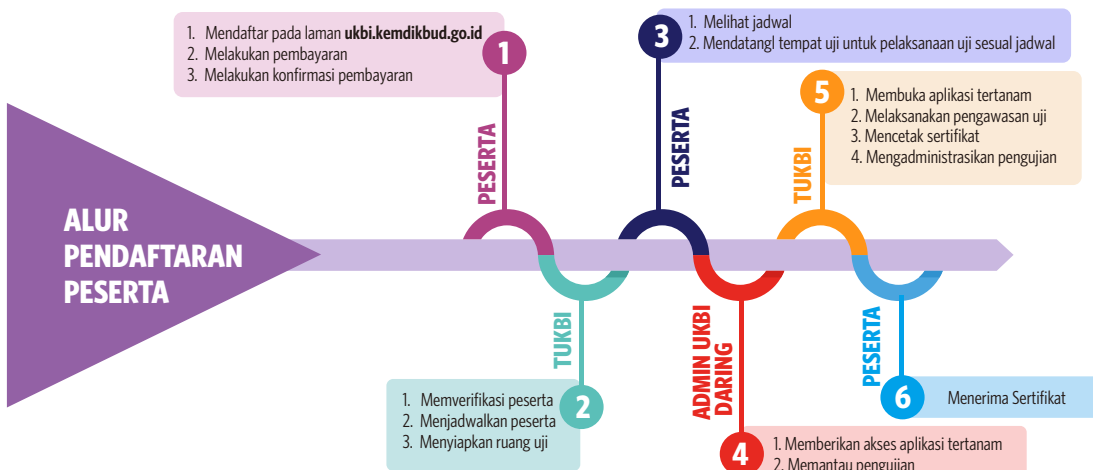
Tahun 2018 ini biaya layanan tes ini adalah sekitar Rp. 500.000- Rp. 3.000.000 dan disesuaikan dengan perguruan tinggi dan daerahnya.

Identifikasi kekuatan Bahasa Indonesia dalam membangun strategi sampai menjadi bahasa resmi tidak hanya berhenti pada pengukuhan, namun harus mampu memastikan bahwa strategi MEA juga menyangkut pada kontribusi negara ASEAN pada penggunaan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Indonesia, karena dalam pengukuhan ada sisi komitmen dalam pemberdayaan Bahasa Indonesia bukan hanya pengakuan. Hal ini dibuktikan, Vietnam membuka mata kuliah Bahasa Indonesia di

Vietnam National University dengan alasan kebanggaan dan ingin berpartisipasi pada penggunaan bahasa dengan jumlah penutur terbanyak keempat di Dunia dan kontribusinya sebagai bahasa resmi di ASEAN.

Dalam kancah internasional, Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup tinggi mengingat negara Indonesia merupakan destinasi investasi, wisata, dan industri. Posisi tawar tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa Indonesia oleh penutur asing, baik yang berada di Indonesia

GAMBAR ALUR PENDAFTARAN PESERTA UKBI



maupun di luar negeri. Berkembang-nya lembaga penyelenggara BIPA di dalam negeri dan di 64 negara menunjukkan hal itu. Untuk menyetarakan bahasa Indonesia agar sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Tanpa menafikan peran wahana lain, UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

Transformasi dalam pelaksanaan program UKBI adalah;

- Sosialisasi kegunaan UKBI dilakukan di kalangan akademisi dan lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi sehingga dapat menjangkau sasaran mahasiswa, pendidik, peneliti, dan lembaga pendidikan.
- Pembuatan materi soal yang mengikuti tren menjadi target kegiatan di Kantor/Balai Bahasa, dengan jumlah soal yang ditentukan oleh Badan Bahasa.

- Membuat strategi bagaimana Uji UKBI yang dahulunya gratis namun sekarang berbayar sehingga peminatnya berkurang pada Tahun 2018. Sedangkan TOEFL yang memang berbayar tidak tergantung pada biaya namun tetap digunakan.
- Penting atau tidaknya UKBI membutuhkan payung hukum mengenai sistem pelaksanaan UKBI dan kelompok manakah yang diharuskan menjadi target UKBI. Sehingga ada peraturan berkenaan perlunya UKBI. Bila UKBI disamakan dengan TOEFL maka ada satu keharusan dimana dan siapakah yang menjadi target utama pengguna dan untuk apa UKBI tersebut menjadi prasyarat tertentu yang digunakan pada kondisi tertentu juga, misalnya untuk prasyarat kelulusan atau kenaikan pangkat.
- Layanan UKBI yang berbayar sehingga berpeluang menjadi PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sehingga butuh mekanisme yang baik dalam pelaksanaannya agar dapat mendukung program globalisasi melalui MEA.

Jadikan UKBI tuan rumah bagi penuturnya di negerinya sendiri sebagai langkah strategis dan buat support system investasi sebagai peluang, kuatkan dengan keberpihakan kebijakan yang diperlukan, globalisasi Bahasa Indonesia dimulai dari UKBI.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Staf Direktorat Pendidikan dan Agama, Bappenas dan Staf Pengembangan dan Riset, SOS Children's Village Indonesia
Email: ayu.eka@support.bappenas.go.id

Philipus Mote :

“Saya Mau Lihat Anak Papua Sehat dan Cerdas”

Oleh **SYAIFULLAH**

Philipus Mote (30), warga Paniai, berdiri di depan sekumpulan ibu-ibu. Di tangannya ada sebuah media komunikasi lembar balik. Dengan penuh percaya diri dia membuka lembar demi lembar media komunikasi yang berukuran AO itu. Dari mulutnya meluncur dengan lancar bahasa Mee, bahasa yang lebih dipahami oleh ibu-ibu yang duduk di depannya.

Philipus sibuk memberikan penjelasan tentang program BANGGA Papua. Lebih khusus lagi, ia menjelaskan tentang tujuan program yaitu menjaga dan memperbaiki gizi anak berusia di bawah empat tahun. Tak lupa juga dia mengingatkan beragam makanan bergizi yang seharusnya dibeli dengan dana dari BANGGA Papua. Lalu dengan tegas dia mengingatkan ibu-ibu itu agar tidak menyalahgunakan dana BANGGA Papua dengan membeli barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan gizi anak.

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI



Sosialisasi Kapan Saja

“Saya memang sudah biasa sosialisasi,” kata Philipus, staf honorer Bappeda Kabupaten Paniai dan sekaligus anggota Sekretariat Bersama (Sekber) BANGGA Papua Kabupaten Paniai. Dia bercerita, dulu dia juga tergabung di program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) di Paniai. Di program itu dia kerap melakukan sosialisasi kepada warga penerima manfaat.

Program RESPEK adalah sebuah program yang digulirkan pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2007 hingga 2013. Di program ini, Philipus menjadi salah satu pendamping kampung. Salah satu tugasnya adalah melakukan sosialisasi program.

Di Sekber BANGGA Papua, Philipus sebenarnya ditempatkan di bagian data. Tugas utamanya adalah mengumpulkan data calon penerima manfaat, yaitu anak-anak berusia di bawah empat tahun, yang lahir dari orang tua berdarah Papua asli, atau salah satu orang tuanya berdarah Papua. Dia bertanggung jawab mengumpulkan data di empat kampung. Namun, meski tugas utamanya adalah mengumpulkan data, Philipus tidak berhenti sampai di situ. Dia mengaku setiap waktu selalu menyelipkan kegiatan sosialisasi BANGGA Papua. Ia selalu berusaha menjelaskan kepada calon penerima manfaat tentang tujuan program, hingga pentingnya menjaga dan meningkatkan gizi anak.

Meski tidak ikut pelatihan komunikasi, namun inisiatif dan kemampuan Philipus patut diacungi jempol. Kemauannya untuk belajar sendiri dan belajar dari teman-teman peserta ToT komunikasi adalah aset besar bagi program BANGGA Papua.

“Pokoknya kalau sambil mendata itu saya juga cerita pentingnya BANGGA Papua sama ibu-ibu di kampung,” terangnya.

Philipus cerita kalau pendataan dan sosialisasi di kampung bukan hal yang mudah. Masih ada pihak yang menolak program BANGGA Papua. Dari yang curiga kalau ini hanya program tipu-tipu. Menghadapi penolakan seperti itu, Philipus mengaku hanya bisa bersabar. Kadang kala, meski dengan berbagai upaya, dia gagal juga menyakinkan mereka.

“Ya mau bagaimana lagi,” kata Philipus, pasrah.

Meski menghadapi tantangan, namun Philipus tidak pernah menyerah. Baginya, tugas yang dibebankan kepadanya adalah tanggung jawab yang harus dia pikul. Bahkan dia melakukan lebih daripada yang dibebankan kepadanya. Sosialisasi tentang program dan penggunaan dana program adalah salah satunya.

Philipus mengaku melakukan sosialisasi kapan saja dan di mana saja. Setiap ada waktu. Bahkan bila melihat ibu-ibu di kampung sedang berkumpul, dia kerap mendatangi mereka dan perlahan-lahan melakukan kegiatan sosialisasi tentang BANGGA Papua.

“Bukan cuma ibu-ibu. Kadang-kadang saya juga sosialisasi ke bapak-bapak,” kata Philipus. Dia melanjutkan, “Bapak-bapak itu penting dikasih tahu tentang BANGGA Papua.”

Ketika ditanya kenapa dia begitu rajin melakukan sosialisasi, Philipus menjawab kalau

sosialisasi ke ibu-ibu di kampung tidak bisa hanya dilakukan sekali. Sosialisasi, menurutnya harus dilakukan berkali-kali. Setiap saat bila perlu.

“Kalau cuma satu kali, mereka bisa lupa,” katanya. Itulah yang membuat Philipus tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi kepada warga di kampung.



Penuh Inisiatif

Saat kegiatan pembayaran pertama dana BANGGA Papua di Kabupaten Paniai, Philipus tidak mau ketinggalan. Saat itu, 13 Desember 2018, pukul sembilan pagi, suasana kantor kas Bank Papua yang berada tidak jauh dari pasar Enarotali, mulai ramai. Ratusan ibu-ibu berkumpul di depan pasar. Mereka adalah para penerima manfaat BANGGA Papua yang akan menerima dana di hari itu.

Satu persatu, mereka dipanggil ke dalam sebuah area di samping kantor Bank Papua yang disulap menjadi kantor pelayanan pembayaran. Ada lima meja di sana, masing-masing dengan fungsinya yang berbeda-beda. Di meja satu, ibu-ibu calon penerima manfaat itu berhadapan dengan anggota Sekber yang memverifikasi kelengkapan berkas mereka. Dari meja satu, mereka akan bergeser ke meja dua, tempat karyawan Bank Papua akan membantu mereka membuka rekening.

Urusan dengan perbankan adalah hal asing yang ditemui oleh ibu-ibu dari kampung di Papua ini. Karenanya, pelayanan kerap tersendat. Petugas butuh waktu lama untuk membantu ibu-ibu membuka rekening. Belum lagi beberapa kali terjadi masalah teknis yang membuat alur pembayaran jadi terhambat. Akibatnya, beberapa

ibu harus sabar menunggu di bangku-bangku yang memang disiapkan.

Melihat antrian ibu-ibu yang sedang menunggu itu, Philipus Mote mengambil inisiatif. Dia maju ke depan ibu-ibu yang duduk manis di bangku yang disusun rapi itu dan melakukan edukasi tentang pemanfaatan dana BANGGA Papua.

“Itu inisiatif dia sendiri,” kata Eli Yogi, Ketua Sekber Paniai. Menurutnya, ketika melakukan *briefing* sehari sebelum pencairan dana, anggota Sekber sudah menyiapkan beragam poster edukasi BANGGA Papua yang ditempel di sekeliling lokasi pembayaran. Pun, mereka sudah mempersiapkan lembar balik BANGGA Papua. Lembar balik itulah yang digunakan Philipus ketika melakukan edukasi di depan ibu-ibu calon penerima manfaat.

Buah ToT

Philipus sendiri sebenarnya tidak pernah ikut pelatihan komunikasi. Ketika ToT (*Training of Trainer*) pelatihan Komunikasi Persuasif digelar oleh Yayasan BaKTI di bulan April 2018, Philipus sedang berada di kampung melakukan pendataan. Jadi bisa dibayangkan dia awalnya masih buta soal penggunaan alat komunikasi yang diproduksi Yayasan BaKTI.



Philipus Mote saat melakukan sosialisasi saat pembayaran pertama BANGGA Papua di Enarotali (kiri) Ibu dan Anak penerima dana Bangga Papua. Melihat anak-anak Papua menjadi lebih sehat dan cerdas adalah impian Philipus.(Kanan)

Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI

“Saya belajar sendiri bagaimana pakainya,” kata Philipus ketika ditanya siapa yang mengajarnya menggunakan alat komunikasi tersebut. “Tapi teman-teman juga ada yang bantu. Ada yang ajar saya juga,” sambungnya. Teman-teman yang dimaksudnya adalah teman-teman yang ikut pelatihan ToT Komunikasi Persuasif. Teman-teman Sekber itulah yang melatih Philipus tentang bagaimana menggunakan media komunikasi seperti lembar balik.

“Memang dia masih ada kekurangan. Tapi kalau dipoles terus, saya yakin dia bisa bagus sekali,” kata Eli Yogi ketika dimintai pendapat tentang Philipus. Kekurangan yang paling kelihatan dari cara Philipus melakukan sosialisasi adalah masih kurangnya interaksi dengan ibu-ibu di depannya. Dia masih terlihat asyik sendiri menjelaskan, tanpa berusaha mencari tahu apakah ibu-ibu itu mengerti atau malah bosan. Tim Yayasan BaKTI yang memonitor kegiatan edukasi pemanfaatan dana langsung

memberikan masukan-masukan kepada Philipus, termasuk agar lebih sering berinteraksi dengan ibu-ibu di depannya. Dengan cepat, Philipus langsung menerapkan saran itu.

“Iya, saya senang sekali dikasih masukan. Jadi bisa memperbaiki diri,” kata Philipus. Menurutnya lagi, masukan dari tim BaKTI itu memperbaiki kemampuannya dalam melakukan sosialisasi.

Meski tidak ikut pelatihan komunikasi, namun inisiatif dan kemampuan Philipus patut diacungi jempol. Kemauannya untuk belajar sendiri dan belajar dari teman-teman peserta ToT komunikasi adalah aset besar bagi program BANGGA Papua. Di lapangan pun dia sudah memberikan buktinya. Dia memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk melakukan sosialisasi kepada calon penerima manfaat BANGGA Papua.

“Saya mau lihat anak-anak Papua sehat dan cerdas,” katanya ketika ditanya kenapa dia giat melakukan sosialisasi.

Sebuah impian yang begitu tulus, yang membuat Philipus selalu bersemangat untuk melakukan sosialisasi, utamanya perihal menjaga dan meningkatkan gizi anak. Meski, seperti kata Eli Yogi, dia masih butuh polesan, namun apa yang sudah dilakukan Philipus adalah cahaya terang untuk Sekber Paniai.

BANGGA Papua adalah program yang diinisiasi oleh Pemprov Papua yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak orang asli Papua, dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus). Melalui BANGGA Papua, Pemprov Papua sedang membangun generasi emas Papua. BANGGA Papua menyediakan dana bagi anak orang asli Papua yang berusia di bawah 4 tahun, untuk digunakan membeli atau menyediakan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Dana diberikan langsung kepada ibu dan ditransfer melalui rekening miliknya. Yayasan BaKTI menerima mandat untuk mendukung komunikasi strategis BANGGA Papua, khususnya meningkatkan kapasitas komunikasi pelaksana program di provinsi dan kabupaten.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang BANGGA Papua, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto: Baiq Falmayani Indira/Yayasan BaKTI

Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Khotbah Jumat

Oleh **BAIQ FALMAYANI INDIRA**

SPerkawinan usia anak (<18 tahun) berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di samping itu perkawinan usia anak berisiko terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Perkawinan usia anak juga menjadi salah satu faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Timur. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) IPM Lombok Timur berada di urutan kedelapan dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mengapa lama sekolah rendah? Karena banyak anak yang putus sekolah. Mengapa putus sekolah? Karena kawin di usia muda. Mengapa usia harapan hidup rendah? Karena banyak bayi dan balita meninggal akibat lahir dari ibu-ibu yang terlalu muda.

Di sisi lain perkawinan anak kalau dibiarkan terus-menerus akan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang tercantum pada tujuan kelima yakni mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Maraknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Lombok Timur harus dicegah, karenanya diperlukan upaya sosialisasi terus-menerus ke masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) H. Suroto, yang melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak melalui Khotbah Jumat.

Pria kelahiran Nganjuk 3 Juli 1966 ini merupakan sosok yang sederhana, mulai menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dari 2014-2016, hingga BPPKB mengalami perubahan menjadi DP3AKB dari tahun 2017-sekarang. H. Suroto memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Timur.

Di sela-sela tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala DP3AKB Lombok Timur, setiap Jumat H. Suroto berkeliling sebagai khatib di berbagai masjid di Lombok Timur. Karena komitmennya yang tinggi dalam pencegahan perkawinan anak, maka di setiap khotbahnya, H. Suroto mensosialisasikan penundaan perkawinan anak. H. Suroto mengajak kepada seluruh jemaah untuk ikut berperan aktif dalam memberikan sosialisasi perlindungan anak dan penundaan usia perkawinan anak ke semua keluarga dan masyarakat.

Hal lain yang disampaikan dalam khotbahnya adalah persoalan rendahnya IPM di Lombok Timur, dimana indikator rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup dan kemampuan daya beli atau pendapatan masyarakat masih di bawah rata-rata. Menurutnya, pemerintah daerah membuat berbagai kebijakan dan mencari solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut. H. Suroto menjelaskan, mengapa lama sekolah rendah karena banyak anak yang putus sekolah (*drop out*)? Mengapa putus sekolah, karena kawin di usia muda. Mengapa usia harapan hidup rendah, karena banyak bayi dan balita meninggal yang lahir dari ibu-ibu yang terlalu muda atau kawin usia anak.

Perkawinan di usia anak berdampak besar pada kemampuan daya beli, karena keluarga baru belum siap secara ekonomi. Jadi kawin di usia anak sangat berdampak besar terhadap masalah pembangunan di daerah dan Indonesia, tetapi sayangnya belum menjadi perhatian serius dari semua pihak termasuk masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan berbagai organisasi harus menyuarkan dampak perkawinan anak atau perkawinan di usia muda. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui DP3AKB telah mencanangkan pemenuhan hak anak, di antaranya berupaya meningkatkan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

H. Suroto menjelaskan, salah satu strategi untuk menekan perkawinan usia anak di sekolah dan madrasah dengan melakukan advokasi dan peraturan sekolah untuk melarang siswanya melakukan perkawinan di usia sekolah. Kemudian desa maupun kelurahan didorong untuk membuat peraturan pendewasaan usia perkawinan secara bertahap. Bagi H. Suroto, setiap orang harus memikul tanggungjawab untuk mencegah perkawinan anak, karena perkawinan di usia anak hanya melahirkan generasi yang lemah, generasi yang tidak bisa diharapkan oleh agama, bangsa, dan negara.

H. Suroto juga menjelaskan bahwa, DP3AKB Lombok Timur juga melakukan kegiatan untuk mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak, diantaranya melalui tokoh agama dan muballiq, sehingga mereka menyampaikan kepada masyarakat. DP3AKB juga membangun



kerjasama dengan mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan karang taruna, sehingga kegiatan-kegiatan mereka juga mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak.

Sosialisasi stop perkawinan anak atau Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di sekolah dan pondok pesantren juga dipadukan dengan pembentukan PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja). Kegiatan PIKR ini selain diisi oleh Kadis P3AKB juga diisi oleh kepala bidang perlindungan anak, Kasi dan petugas lapangan. Sasaran anak yang sudah mendapatkan PIKR dalam setahun jumlahnya mencapai lebih 8.000 anak.

Dalam khotbahnya, H. Suroto juga mengupas berbagai persoalan anak yang terjadi di masyarakat. H. Suroto menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh siapa pun, tidak membuat anak menjadi baik. Kekerasan hanya membuat anak-anak menjadi keras dan lari dari rumah atau lari dari sekolah. Orang tua harus belajar dan dididik untuk

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) H. Suroto, kedua dari kiri.

Foto : Baiq Falmayani Indira/Yayasan BAKTI

menjadi orang tua yang mendidik dengan menggunakan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mendidik anak-anaknya, termasuk mencegah perkawinan anak.

H. Suroto menyampaikan, dilihat dari data di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan DP3AKB Kabupaten Lombok Timur bahwa, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Lombok Timur mencapai sekitar 400.000 dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 285.000 yang telah mengikuti program KB mencapai 70 % dari PUS atau sekitar 190.000 dari jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai lebih 1,3 juta jiwa. Sekitar 30.000 ibu yang melahirkan di Lombok Timur, 26.000 di antaranya adalah ibu-ibu muda di bawah 20 tahun. Jumlah perkawinan di



Lombok Timur setiap tahun mencapai sekitar 13.000, 50 % berusia muda.

Beberapa faktor penyebab mengapa masih banyaknya perkawinan muda antara lain karena faktor ekonomi keluarga, minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi, faktor sosial budaya, dan faktor peraturan perundangan yang masih memperbolehkan kawin muda yaitu UU No 1 Tahun 1974 yaitu perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Ada juga anak-anak yang terpaksa dikawinkan karena terlanjur hamil, tapi ini sedikit.

H. Suroto mengemukakan bahwa, dari beberapa dialog yang dilakukan di kalangan remaja dan santri banyak dari remaja mengusulkan pemerintah menetapkan peraturan baru batas kawin minimal 20 tahun, memperbanyak kegiatan anak dan remaja di semua desa yang difasilitasi pemerintah desa.

Merespon hal tersebut Pemerintah Lombok Timur melalui DP3AKB akan meningkatkan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ke semua

Setiap orang harus memikul tanggungjawab untuk mencegah perkawinan anak, karena perkawinan di usia anak hanya melahirkan generasi yang lemah, generasi yang tidak bisa diharapkan oleh agama, bangsa, dan negara

sekolah dan madrasah bersama para pihak baik pemerintah desa, kelurahan, sekolah dan LSM untuk peduli terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui Peraturan Desa (Perdes) dan peraturan di sekolah dan madrasah.

Disampaikan oleh H. Suroto pentingnya berbagai elemen untuk menyuarakan secara bersama – sama dampak negatif dari perkawinan usia anak. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan melalui kerjasama berbagai pihak yang peduli terhadap persoalan ini. Terutama dengan satuan pendidikan termasuk dengan pemerintah desa. Salah satunya melalui sosialisasi dampak perkawinan usia anak di sekolah dan advokasi untuk melarang siswa melakukan perkawinan usia anak. Diharapkan juga desa supaya bisa membuat *awiq-awiq* (aturan adat di tingkat dusun atau desa) untuk melarang perkawinan usia anak sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi penerus bangsa.

Dengan kerja keras dan semangat yang tiada henti yang dilakukan oleh H. Suroto mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak, telah diikuti dengan lahirnya kebijakan Bupati Lombok Timur, yang mengeluarkan surat kepada semua camat untuk mendukung Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta mengkoordinasikan dengan Lurah dan Kepala Desa dalam bentuk program dan kegiatan yang ada di desa maupun kelurahan. Sebagai apresiasi pemerintah daerah, maka akan diberikan Penghargaan bagi Desa/Kelurahan yang berhasil menekan perkawinan usia anak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU BaKTI dapat menghubungi email info@bakti.or.id

Salah satu indikator lingkungan sehat apabila memenuhi Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kelima pilar tersebut adalah tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan secara aman, mengelola sampah dengan benar, dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Sanitasi pada umumnya masih menjadi permasalahan di masyarakat terutama penggunaan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah). Sebagian besar menganggap SPAL belum menjadi kebutuhan utama terutama di pedesaan.

Ini pula yang terjadi di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbengkeng Selatan Kabupaten Takalar cakupan SPAL baru 8,8 %. Artinya yang memiliki SPAL baru 39 dari 439 KK. Kondisi air limbah terbuang begitu saja sehingga menyebabkan bau, airnya tergenang serta dapat mencemari sumber air bersih dan mengakibatkan munculnya diare, cacingan, dan penyakit kulit. Tahun 2014, angka diare di desa Su'rulangi sebanyak 90 kasus dan meningkat menjadi 96 kasus pada tahun 2015.

Desa Su'rulangi terletak di Kecamatan Polombangkeng Selatan serta merupakan Wilayah kerja Puskesmas Bulukunyi. Pada tahun 2014 desa Surulangi telah mendeklarasikan sebagai desa *Open Defecation Free* (ODF) atau desa yang tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar dengan cara sembarangan. Demikian pula dengan ketiga pilar

“BUAH SABAR”

SOLUSI LINGKUNGAN SEHAT

Oleh **Yuliati**



lainnya telah dilaksanakan meskipun belum optimal. Namun masih ada satu pilar yang belum dilaksanakan yaitu pengolahan limbah cair rumah tangga. Berangkat dari masalah ini petugas sanitarian Puskesmas Bulukunyi melakukan pemantauan di Desa Surulangi memikirkan agar desa tersebut dapat melaksanakan lima pilar STBM.

Hal ini tidaklah mudah dilakukan karena berhubungan dengan pembangunan fisik yang menggunakan biaya. Untuk itu petugas memberikan ide yang kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah desa untuk membuat inovasi dalam bidang kesehatan yaitu



Foto : Yuliati

Pembuangan Air Limbah Sederhana dan Bermanfaat (BUAH SABAR) bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di desa tersebut agar bisa terhindar dari penyakit berbasis lingkungan dengan cara pembuatan SPAL sederhana yang tidak memerlukan biaya yang banyak.

Dalam hal ini inovasi yang ingin dilaksanakan yaitu pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) sederhana dari sumber daya lokal yang ada di wilayah desa Su'rulangi seperti bambu, ban bekas, ijuk dan pasir. Pembuatan SPAL sederhana ini tergolong unik karena menggunakan bahan lokal seperti bambu untuk menutup lubang galian, batu gunung, pasir dan ijuk dapat dimasukkan ke dalam lubang dengan

tujuan untuk menyaring air sebelum meresap ke dalam tanah. Kemudian ditutup dengan anyaman bambu yang dilapisi karung agar baunya tidak keluar, kemudian air buangan dialirkan ke lubang yang telah dibuat dengan menggunakan pipa. Dengan demikian tidak ada lagi genangan air yang berbau yang dapat mencemari sumber air bersih dan mengganggu secara estetika yang membuat orang lain yang melihat merasa jijik. Selain itu, masyarakat tidak perlu membeli bahan tersebut karena mudah dijumpai di Desa Su'rulangi yang merupakan daerah tambang penghasil batu gunung maupun pasir.

SPAL bukanlah hal yang baru, selama ini banyak dijumpai adalah SPAL Permanen yang



membutuhkan banyak biaya sehingga kalangan ekonomi menengah kebawah tidak mampu membuat karena mementingkan kebutuhan primer. Selama ini air limbah buangan dari dapur tergenang begitu saja akan tetapi setelah membuat SPAL sederhana air buangan tersebut terbuang ke lubang yang telah disiapkan. Meskipun penutupnya hanya dari bambu tetapi sudah tidak menimbulkan bau dan tidak menjadi tempat bagi vektor seperti lalat dan tikus berkembangbiak.

Pihak-pihak terkait yang mengusulkan dan berperan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan inovasi tersebut yaitu Sanitarian, Kepala Puskesmas, Dinas kesehatan (Seksi Penyehatan Lingkungan), Koramil Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Aparat Desa Su'rulangi.

Pendekatan yang dilakukan selain kepada pemerintah Desa yaitu pendekatan kepada masyarakat sendiri dengan menjalin pertemanan dengan mereka dan bersikap ramah agar terjalin keakraban serta melibatkan kader dan tokoh masyarakat sebagai motivator dalam kegiatan ini. Selain itu Puskesmas memberikan *Reward* berupa bingkisan dan sertifikat bagi kepala dusun yang aktif bekerja sama dalam meningkatkan kesehatan lingkungan selain itu pihak Puskesmas juga memonitor serta memberikan pengarahan

Proses pembangunan SPAL sederhana di wilayah desa Su'rulangi.

Foto : Yuliati

kepada masyarakat untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Secara berkala dilakukan sosialisasi kepada warga mengenai masalah kesehatan tidak hanya memberikan pemahaman terkait perubahan perilaku, namun intervensi yang sesungguhnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa untuk menggerakkan masyarakat agar mau membuat SPAL sederhana. Demikian pula dengan kader desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan ini terutama pendekatan kepada masyarakat serta melaporkan kepada petugas perkembangan tentang pembuatan SPAL sederhana ini.

Masyarakat menyambut baik inovasi ini, mereka terlibat secara aktif dan partisipatif dalam pembuatannya. Dalam waktu satu tahun (2016), SPAL yang terbangun sebanyak 97 unit dan bertambah menjadi 231 unit (2017). Ini memberikan dampak menurunnya kasus diare menjadi 41 kasus (42,71 %) tahun 2017 dan lingkungan terlihat lebih bersih. Terbangunnya Rumah Sehat 15 KK. Sebelum adanya inovasi rumah sehat di Desa Su'rulangi hanya 2 KK dan setelah inovasi sebanyak 15 KK berdasarkan syarat sanitasi dasar. Selain itu Adanya Surat

Beberapa desa di wilayah kerja Puskesmas Bulukunyi sudah mereplikasi kegiatan ini bahkan dari desa wilayah Puskesmas lain yaitu Mappakasunggu dan Galesong, serta lembaga seperti Bill Melinda Gate Foundation (BMGF) telah melakukan kaji banding.

Keputusan Tim Percepatan pembuatan SPAL sederhana Desa Su'rulangi dengan jumlah penanggungjawab sebanyak 11 orang.

Untuk pemantauan penggunaan SPAL sederhana sudah dianggarkan dalam dana BOK Puskesmas, hal ini dilakukan demi kelangsungan kegiatan ini dan memberikan semangat kepada petugas Kesehatan Lingkungan di Puskesmas agar lebih giat dan bersemangat dalam melakukan pemantauan.

Beberapa Desa di wilayah kerja Puskesmas Bulukunyi sudah mereplikasi kegiatan ini bahkan dari desa wilayah Puskesmas lain yaitu Mappakasunggu dan Galesong, serta Lembaga seperti Bill Melinda Gate Foundation (BMGF) telah melakukan kaji banding.

Dari jumlah pengguna SPAL sederhana yang semakin meningkat, dapat dilihat bahwa program inovasi ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen yang telah dibangun bersama untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

Untuk evaluasi dan pemantauan kemajuan pembuatan SPAL sederhana ini, maka setiap 2 kali dalam sebulan petugas turun ke desa melakukan pemantauan perkembangan tentang pembuatan SPAL tersebut dan juga selalu melakukan koordinasi dengan kepala desa Su'rulangi dan kepala dusun serta melibatkan kader agar melaporkan kepada sanitarian jika ada warga yang telah membuat sendiri SPAL sederhana.

Kepala Desa Su'rulangi juga tidak main-main dalam kegiatan tersebut bahkan untuk memberikan perhatian kepada kader desa yang sudah banyak membantu dalam peningkatan sarana kesehatan lingkungan maka kepala desa berencana akan memberi anggaran kepada

kader yang turun ke masyarakat untuk melakukan pemecuan.

Terciptanya masyarakat sehat yang mandiri dan berkemampuan akan menjadi harapan tersendiri bagi pihak Puskesmas dan pemerintah desa serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini saat mereka berhasil mengaplikasikan kesehatan lingkungan dengan baik. Jika masyarakat sehat, maka hal ini akan menciptakan generasi yang mandiri terutama secara finansial karena jiwa dan tubuh yang sehat tentunya akan memberikan semangat tersendiri serta rasa fokus bagi mereka dalam bekerja. mereka tidak akan terbebani untuk berobat ke dokter sehingga konsentrasi dalam bekerja akan semakin meningkat. ketika mereka sudah mandiri secara finansial, maka mereka berkemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masing-masing.

Diharapkan dengan adanya kegiatan Inovasi ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama di Desa Su'rulangi dan di wilayah kerja Puskesmas Bulukunyi lainnya.

Inovasi Buah Sabar diikutsertakan dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini melalui proses seleksi, *coaching* yang dilakukan tim independen dari GIZ, Yayasan BaKTI, Kompak, PKP2A LAN, STIA LAN yang dalam prosesnya bekerja sama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Ortala) Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Biro Ortala bertindak sebagai leading sektor pelayanan publik yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan inovasi pelayanan untuk diikutsertakan pada kompetisi tingkat nasional melalui SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik).

Tujuan dari kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan dalam kegiatan seleksi dan *coaching* ini salah satunya adalah untuk menguatkan pencapaian *good governance*.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Kepala Puskesmas Bulukunyi dan dapat dihubungi melalui email yuliat120780@gmail.com

Pengabdian Guru Herlina Silubun Untuk Anak-Anak Asmat

(Bagian 2) Selesai

Oleh **PETRUS SUPARDI**

Hal pertama yang dilakukan Herlina setelah ditunjuk menjadi Kepala Sekolah adalah menggelar rapat bersama para guru untuk menentukan prioritas

perbaikan di SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. Kebetulan pada saat itu, dana BOS juga telah cair. Dari rapat tersebut disepakati bahwa hal-hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan infrastruktur diantaranya, perbaikan WC yang rusak, perbaikan ruang sirkulasi yang menghubungkan kedua gedung sekolah dan perbaikan pintu-pintu kelas yang mulai rusak.

Selain itu, Herlina berpikir untuk segera memperbaiki ruang perpustakaan yang selama ini menjadi gudang untuk menyimpan meja dan kursi yang sudah rusak. Tetapi, ia harus bersabar, karena dana BOS tidak sepenuhnya bisa dipakai untuk perbaikan sekolah sekaligus. "Dana BOS tidak banyak, sehingga perbaikan dilakukan bertahap.

Foto: Petrus Supardi/Yayasan BaKTI





“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya komite sekolah. Mereka membantu menjaga keamanan sekolah. Mereka terlibat memperbaiki jalan yang rusak. Kalau ada anak yang tidak masuk sekolah, mereka biasa mengecek ke rumah siswa tersebut”

Perpustakaan akan diperbaiki pakai dana BOS tahap berikut,” tutur Herlina.

Selain itu, pekarangan sekolah yang selama ini dipenuhi belukar akan dibersihkan dan dimanfaatkan untuk kebun sekolah. “Lahan di belakang sekolah, saat ini masih dipenuhi rumput, tetapi ke depan, saya akan pimpin orang tua siswa untuk bersihkan dan bikin kebun sekolah” tutur Pastor Paroki St. Martinus de Pores Ayam, Pastor Fransiskus Vesto Maing, Pr pada saat pelatihan SPM dan MBS di Ayam.

Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi para murid, perbaikan pada fasilitas pendukung kegiatan belajar akan meningkatkan kualitas muridnya.

Foto : Petrus Supardi/Yayasan BaKTI

Serasa gayung bersambut. Semangat dan komitmen Herlina untuk melakukan perbaikan SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam bertepatan pula dengan kehadiran KOMPAK LANDASAN di Distrik Akat. Herlina Sophia Silubun berkomitmen mengawal seluruh proses perbaikan di SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam.

Pada kunjungan tersebut, Herlina mendapat kesempatan mengikuti Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) II, yang akan digelar di Agats, pada 19-20 Februari 2018. Herlina bersama rekan gurunya hadir pada pelatihan tersebut. Berbekalkan pelatihan singkat itu, Herlina mulai melakukan perbaikan di SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam.

Guru Herlina juga menaruh perhatian pada Perpustakaan yang sudah lama terbengkalai.



“Saya buat sekolah menjadi bagus supaya anak-anak senang datang ke sekolah. Kalau sekolah sudah menjadi tempat yang nyaman, maka dengan sendirinya anak-anak akan semakin rajin datang ke sekolah”.

“Itu bukan Perpustakaan. Itu gudang saja. Tetapi, kami akan perbaiki,” kisahny.

Akhir Juli 2018, Herlina sudah mulai membenahi perpustakaan. Ruangan yang sebelumnya menjadi tempat menaruh barang-barang bekas, kini berubah rupa menjadi ruang baca yang ramah anak. Rak-rak buku melekat pada dinding perpustakaan. Sedangkan lantai papan yang sebelumnya kusam kini dibalut karpet hijau. Anak-anak bisa leluasa mengambil buku di rak. Kemudian, mereka duduk bersila dan membacanya.

Anak-anak di Asmat. Lebih banyak menghabiskan hari mereka dengan bermain seusai waktu sekolah. Kebijakan di SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam dengan menambah 1 jam waktu belajar dari waktu normal di sekolah ditujukan agar mereka lebih maksimal menggunakan waktunya untuk belajar.

Foto : Fadhilah Mansyur/Yayasan BaKTI

“Sekarang, saya menghabiskan banyak waktu di ruang perpustakaan. Saya mengawasi langsung anak-anak yang datang membaca buku di perpustakaan. Anak-anak senang sekali ke perpustakaan. Anak-anak kelas satu, mereka suka lihat gambar. Kalau anak-anak kelas dua, kelas tiga, mereka sudah bisa baca,” tutur Herlina penuh haru.

“Perpustakaan kami kini sudah memiliki koleksi buku sebanyak dua ribu buku bacaan dan buku pelajaran siswa. Ke depan, kami akan menambah koleksi buku bacaan untuk anak-anak,” tutur Herlina dengan penuh rasa bangga.

Herlina bersama dengan para guru lainnya juga membersihkan pekarangan sekolah.

Sejak dirinya menjadi kepala sekolah, sampah yang biasa ditumpuk di halaman depan sekolah telah dipindahkan ke belakang. Selain itu, halaman belakang sekolah yang sebelumnya hutan lebat, kini telah bersih.

Bulan Agustus-September 2018, melalui kehadiran Bruder Elias Logo OFM, yang difasilitasi oleh LANDASAN, SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam membuka kebun sekolah. Halaman belakang yang sebelumnya ditumbuhi rumput dan pohon-pohon yang tinggi, kini menjadi kebun sekolah.

Herlina menyadari dirinya tidak bisa bekerja sendiri bersama para guru untuk membenahi SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. Ia membutuhkan keterlibatan orang tua. Karena itu, ia membentuk Komite Sekolah yang terdiri dari orangtua murid, tua-tua adat dan tokoh perempuan. Dalam pertemuan tersebut, Paulus Bowbiram terpilih menjadi ketua Komite Sekolah dan Sergius Peri sebagai Sekretaris dan Yuliana Siforo sebagai bendahara.

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya komite sekolah. Mereka membantu menjaga keamanan sekolah. Mereka terlibat memperbaiki jalan yang rusak. Kalau ada anak yang tidak masuk sekolah, mereka biasa mengecek ke rumah siswa tersebut,” tutur Herlina.

Herlina juga melakukan berbagai terobosan perbaikan di SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. Ia memiliki impian bahwa setiap anak Asmat harus merasa senang dan nyaman di sekolah. “Saya buat sekolah menjadi bagus supaya anak-anak senang datang ke sekolah. Kalau sekolah sudah menjadi tempat yang nyaman, maka dengan sendirinya anak-anak akan semakin rajin datang ke sekolah,” tutur Herlina.

Setelah melakukan perbaikan infrastruktur, hal selanjutnya yang dilakukan oleh Herlina adalah mengatasi anak-anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Satu hal yang sangat disadari Herlina adalah anak-anak yang sudah tidak mau belajar selepas pulang sekolah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Herlina menyiasatinya dengan menambah jam pelajaran di kelas. “Biasa di rumah anak-anak tidak

terbiasa belajar, maka kalau sekolah selesai pukul 12.05 WIT, saya biasa minta para guru kami tambah waktu sampai pukul 13.00 WIT. Setelah itu, anak-anak boleh pulang ke rumah,” tambahnya.

Herlina menjelaskan bahwa di SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam, tidak asal libur. “Kami di sini, libur hanya pada hari raya keagamaan. Selain itu, kami tidak libur. Karena, kalau kami libur terus, nanti anak-anak pikir tidak sekolah jadi mereka ikut orang tua pergi ke dusun,” tegas Herlina.

Tantangan lainnya adalah luas kelas yang tidak memadai untuk digunakan oleh jumlah siswa Kelas 1 yang mencapai 80-an siswa. “Siswa kelas satu adalah yang paling rajin datang ke sekolah. Jumlah yang terlalu banyak dan ruangan yang sempit membuat guru kewalahan. Untuk mengatasi kondisi ini, kami membuka kelas siang khusus untuk Kelas 1. Dengan demikian, siswa Kelas 1 dapat menempati tiga ruang kelas dan proses belajar menjadi lebih nyaman,” jelas Herlina.

Herlina Sopia Silubun tidak berjalan sendirian dalam memperbaiki SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. Ia bersama para guru senantiasa ditopang oleh Pastor Paroki St. Martinus de Pores Ayam, Pastor Vesto Maing, Pr. “Pastor Vesto selalu hadir dan memberikan dukungan kepada kami di sekolah. Dia sangat memperhatikan sekolah ini,” tutur Herlina.

Ia juga menambahkan bahwa Kepala UPTD Pendidikan Distrik Akat, Blasius Fofied turut memberikan perhatiannya. Blasius selalu ke sekolah dan menyapa para guru. Selain itu, ia juga bersedia mengantar para guru ke Agats menggunakan *speed boat* kalau ada kebutuhan mendesak.

Kehadiran KOMPAK LANDASAN di Distrik Akat memberikan semangat baru bagi Herlina. Melalui pelatihan SPM dan MBS serta pendampingan yang diberikan oleh Koordinator Distrik Akat, Arita Meak membantu Herlina dan para guru SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KOMPAK-LANDASAN II, dapat menghubungi info@bakti.or.id

MEMBANGUN KAMPUNG DENGAN DATA

Oleh **FADHILAH MANSYUR**

Dalam dunia perencanaan, terdapat sebuah istilah *garbage in garbage out, gold in gold out*. Apabila input data dalam perencanaan tidak akurat, maka keputusan yang dihasilkan juga tidak akan akurat. Sebaliknya, apabila input data akurat maka keputusan yang dihasilkan akan akurat.

Data adalah hal penting dalam proses pembangunan suatu wilayah terutama bagi Papua dan Papua Barat yang memiliki sebaran masyarakat yang cukup luas serta infrastruktur yang belum memadai. Data yang tersedia akan memudahkan pemerintah dalam menentukan dan merencanakan prioritas pembangunan sehingga tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ada ungkapan bahwa data itu mahal namun lebih mahal lagi membangun tanpa data. Penyusunan data untuk pembangunan kampung bukanlah hal yang mudah serta murah namun, membangun tanpa data hanya akan menya-nyaiakan waktu dan biaya. Hal ini telah disadari oleh beberapa kampung di Papua dan Papua Barat yang dengan perlahan memulai mencoba mengumpulkan data kampung dan menggunakan data tersebut untuk melakukan perencanaan dan penganggaran data kampung. Kampung ini adalah kampung Waharia yang terletak di Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Papua dan Kampung Yekwandi yang terletak di Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan.

Beberapa rencana yang diusulkan di kedua kampung tersebut dibuat berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan sepanjang tahun 2018. Data-data yang dikumpulkan ini berupa data-data kependudukan serta data sosial dan ekonomi setiap rumah tangga.



Proses pengumpulan data ini tidaklah mudah dan menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi geografis kedua kampung tersebut yang cukup rumit serta sebaran penduduknya yang tinggi. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah Kampung untuk melengkapi data-data tersebut.

Proses pengumpulan data ini tidak lepas dari peranan kader yang dibentuk oleh pemerintah kampung yang disebut dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK). Setiap kampung memiliki minimal dua orang KPMK yang bertugas untuk berkeliling kampung, mendatangi setiap rumah dan mengumpulkan semua data yang diperlukan.



Penyusunan data untuk pembangunan kampung bukanlah hal yang mudah serta murah namun, membangun tanpa data hanya akan menyia-nyiakan waktu dan biaya.

Merencanakan Dengan Data

Pada tanggal 15 Februari 2019, setelah melakukan pengumpulan data selama kurang lebih satu tahun, warga Kampung Waharia berkumpul bersama di kantor kampung untuk melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbangkam). Musyawarah ini dipimpin oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan dihadiri oleh perwakilan RT,

Proses pengisian data kampung yang dilakukan oleh kader kampung. Data yang terkumpul ini mampu memproyeksikan kondisi sosial ekonomi dan kesehatan kampung yang kemudian menjadi referensi utama dalam proses perencanaan kampung.

Foto : NJ. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

Kaur, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam musyawarah tersebut dilakukan penggalan gagasan-gagasan untuk dimasukkan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran kampung 2019. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah banyaknya warga Kampung Waharia yang belum memiliki rumah. Masalah ini diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh kader.



Berdasarkan data tersebut, dari total 360 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Waharia, terdapat 32 KK yang masih berstatus menumpang dan belum memiliki rumah pribadi. Mereka pada umumnya masih menumpang di rumah keluarga atau kerabat. Hal ini menyebabkan padatnya jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah.

Menjawab permasalahan tersebut, usulan pembuatan rumah layak huni pun dimasukkan kedalam perencanaan penganggaran kampung untuk tahun 2019 untuk menyediakan rumah-rumah bagi keluarga yang masih menumpang tersebut.

Selain di Kampung Waharia, Kampung Yekwandi yang terletak di Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan juga mengangkat kepemilikan rumah menjadi isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan di musyawarah kampung.

Musrenbang Kampung Yekwandi yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2019 ini menunjukkan bahwa di Kampung Yekwandi sendiri memiliki 14 KK yang belum memiliki rumah. Sama seperti kampung Waharia, data tersebut juga berasal dari kader yang melakukan pendataan dengan mendatangi setiap rumah di kampung tersebut selama tahun 2018.

Akan tetapi menurut hasil musyawarah tersebut dalam penganggaran tahun 2019 di

“Sebelum adanya data, setiap musrenbang kami hanya duduk sama-sama dan mengira-ngira apa saja yang dibutuhkan. Kalau sekarang ada data, tinggal kasi keluar data, langsung keliatan apa saja yang mau kita bikin”

Kampung Yekwandi, pembuatan rumah hanya akan dibatasi dua rumah saja. Lalu, bagaimana pemerintah kampung menentukan penerima manfaat rumah layak huni tersebut? Selain mendata jumlah KK yang belum memiliki rumah, kader juga melakukan pendataan kependudukan serta sosial ekonomi masyarakat.

Dari data ini terlihat KK yang memiliki tingkat ekonomi rendah dengan usia perkawinan yang lebih lama dan jumlah anak yang lebih banyak. Pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima bantuan rumah layak kemudian mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sehingga ditemukan keluarga yang paling layak menerima bantuan.

Dari proses tersebut terlihat bahwa, pembangunan dengan menggunakan data tidak hanya akan menjadi tepat sasaran namun juga lebih transparan karena setiap keputusan yang diambil dapat ditelusuri latar belakangnya.



Dua kader desa ketika mengambil data warga (kiri)
Pengisian data kampung oleh kader desa (kanan)
Foto : Dok. Yayasan BaKTI

Selain pembangunan rumah, isu penting yang juga dibahas pada Musrenbang Kampung Waharia adalah permasalahan air bersih. Sumber air bersih merupakan salah satu tantangan bagi warga kampung Waharia, Teluk Kimi. Berdasarkan data ditemukan terdapat 30 rumah yang belum memiliki sumber air bersih dan masih menggunakan air dari sumur galian yang tidak layak untuk digunakan. Maka, salah satu saran dalam Musrenbang tersebut selain menyediakan penambahan rumah juga menyediakan sumber air bersih yang layak pakai bagi 30 rumah tersebut.

Angka tersebut juga diperoleh dari hasil kerja kader kampung yang melakukan pengecekan di setiap rumah. Mengumpulkan data-data apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga diketahui bahwa setiap rumah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Berbeda dengan kebutuhan Kampung Waharia akan penyediaan sumber air bersih, warga kampung Yekwandi Distrik Momiwaren, Manokwari Selatan memprioritaskan

pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK). Hal ini disebabkan karena pada umumnya warga dari kampung tersebut belum memiliki MCK. Tentu saja, pembangunan MCK ini juga akan dilengkapi dengan aliran air bersih.

Jumlah yang akan dibangun juga akan disesuaikan dengan jumlah warga dan dibangun di lokasi-lokasi yang terjangkau. Penentuan lokasi pembangunan MCK ini sangat penting agar tidak terlalu jauh dari perumahan warga yang membutuhkan. Sebelum adanya data desa, kebutuhan akan MCK juga telah dirasakan oleh pemerintah kampung. Sehingga, pemerintah pun mengalokasikan dana untuk pembangunan MCK tersebut. Sayangnya, MCK dibangun di daerah perumahan warga yang telah memiliki WC pribadi sehingga pada akhirnya, MCK tersebut tidak digunakan. Berkat adanya data, telah teridentifikasi, rumah mana saja yang belum memiliki MCK tersebut.

Dari pengalaman kampung Yekwandi, dapat terlihat bahwa peranan data memang sangat penting dalam pembangunan.

Sedangkan di Kampung Waharia dirasakan bahwa, proses pengambilan keputusan dalam musyawarah kampung menjadi lebih mudah setelah adanya data. “Sebelum adanya data, setiap Musrenbang kami hanya duduk sama-sama dan mengira-ngira apa saja yang dibutuhkan. Kalau sekarang ada data, tinggal kasi keluar data, langsung keliatan apa saja yang mau kita bikin” ungkap Doni, Kader Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Nabire.

Doni juga menambahkan bahwa bagi warga Kampung Waharia, ini adalah tahun pertama dana Kampung dialokasikan untuk membantu menjawab kebutuhan perumahan untuk warga, sebelumnya alokasi dana kampung hanya diperuntukkan untuk membangun infrastruktur umum seperti pembangunan jalan desa. Hal ini terjadi karena pemerintah kampung tidak pernah betul-betul mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah adanya data, barulah diketahui bahwa ada banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan menggunakan dana kampung.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program KOMPAK - LANDASAN II, hubungi kami melalui email: info@bakti.or.id

Peluang & Tantangan Ekonomi Digital

Oleh
MUHAMMAD AULIA Y GUZASIAH

Perusahaan *start-up* dan industri ekonomi digital, saat ini tengah menjadi sektor usaha yang begitu potensial bagi perekonomian Indonesia. Selain terlihat pada meningkatnya jumlah *start-up* Indonesia yang berpredikat sebagai *unicorn*, hal ini juga terlihat pada tren tiga tahun belakangan ini, dimana investor asing mulai gencar menanamkan modalnya hingga mencapai 2 miliar dollar US, atau sebesar 27,98 triliun rupiah jika dirupiahkan dengan kurs 13.999 rupiah per dollar US, ke dalam sektor usaha tersebut.



Laporan lembaga riset global McKinsey bahkan menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 150 miliar US dollar pada 2025

Melihat kenyataan ini, bukan tidak mungkin sektor ekonomi digital di masa depan menjadi penopang perekonomian Indonesia. Terlebih apabila melihat lesunya kondisi perekonomian dari segi arus modal yang masuk di Indonesia, menurut Thomas Lembong, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sektor tersebut mampu menjadi penyelamat dengan mengundang investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) sekitar 15-20 persen dari rata-rata total FDI yang setiap tahunnya mencapai 9-12 miliar dollar US (Katadata.co.id 27/2).

Laporan riset Google-Temasek pada akhir 2018, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar dan tercepat pertumbuhannya, dimana memiliki 4 dari 8 *start-up unicorn* yang ada di Asia Tenggara, diprediksi akan menikmati 40 persen dari nilai ekonomi digital Asia Tenggara yang telah mencapai 72 miliar dollar US dan diperkirakan akan terus membesar hingga mencapai 240 miliar dollar US atau 3.360 triliun rupiah pada 2025. Lebih jauh, laporan lembaga riset global McKinsey bahkan

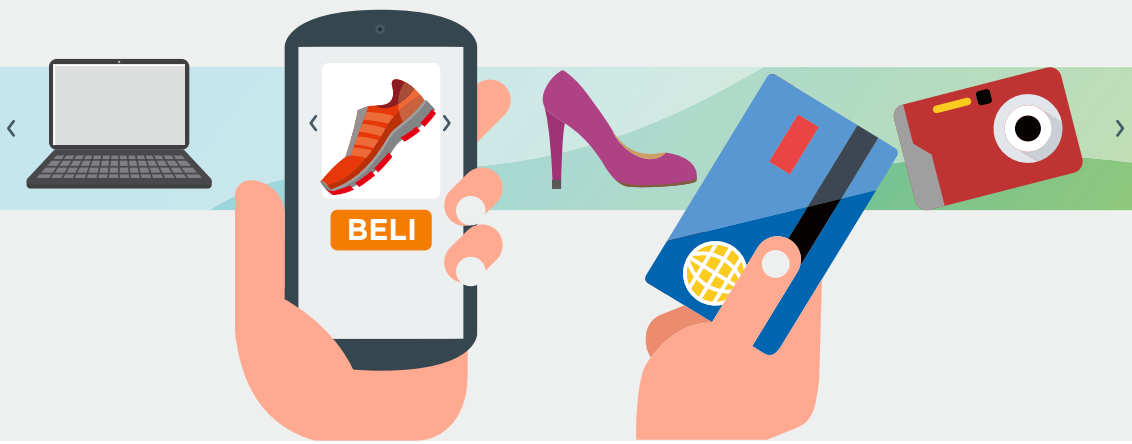
menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 150 miliar US dollar pada 2025 (Katadata.co.id 22/2).

Meski demikian, jika memperhatikan berbagai keluhan dari para pelaku *start-up*, dan juga oleh sejumlah kalangan, persoalan regulasi masih menjadi batu sandungan terhadap berbagai pengembangan ekosistem dan investasinya. Mulai dari banyak serta semrawutnya berbagai regulasi dari kementerian/lembaga terkait yang berbeda dalam hal mengatur pendiriannya, hingga kurang kondusifnya regulasi yang ada dalam mengatur perusahaan *start-up* untuk *go public* dan melantainya sahamnya (*Initial Public Offering/IPO*) ke bursa saham dalam negeri.

Dalam tataran rezim regulasi pendiriannya saja misalnya, para pelaku usaha memang diberikan kemudahan dalam melakukan pendirian *start-up*, yakni hanya diharuskan untuk melakukan pendaftaran sebagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dapat dilakukan secara *online*, akan tetapi setelahnya perusahaan *start-up* itu kemudian dihadapkan dengan beberapa perizinan dari berbagai peraturan kementerian/lembaga terkait, tergantung dari bidang usaha yang digeluti.

Apabila bergerak di bidang Teknologi Finansial, *start-up* itu akan dihadapkan dengan beberapa perizinan pada berbagai peraturan dari Kominfo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Apabila bergerak di bidang perdagangan, tentunya juga akan melibatkan peraturan Kementerian Perdagangan, apabila bergerak di bidang transportasi, akan berhadapan dengan peraturan Kementerian Perhubungan, apabila bergerak di bidang pertanian, akan berurusan dengan peraturan Kementerian Pertanian, dan begitulah seterusnya.

Sementara perusahaan *start-up* akan terus berinovasi dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, regulasi akan selalu terlampaui lambat untuk mengikuti. Realitas ini tergambar persis dalam *adagium*



hukum klasik yang berbunyi *'het recht hinkt achter de feiten aan'* yang berarti hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman.

Hal ini tentu dapat diatasi, jika seandainya pemerintah dapat membuat pengaturan yang utuh dalam mengatur pendirian, pengoperasian serta bantuan-bantuan dan keringanan bagi pengembangan ekosistem perusahaan *start-up*, kedalam satu regulasi yang dapat menaungi berbagai bidang usaha dan perkembangan teknologi.

Jenis regulasi ini, tentunya tidak bisa mengandung materi muatan yang kaku, atau dengan kata lain harus mengandung norma pelindung yang dapat berlaku dinamis, namun tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konsumen.

Adapun dari sisi regulasi investasinya, sudah menjadi pengetahuan umum dalam dunia perusahaan bahwa kedudukan serta kehadiran investor, merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan. Untuk dapat menopang, menjaga napas keberlangsungan dan pengembangan perusahaannya, sebuah perusahaan sudah tentu memerlukan suntikan modal investasi dari seorang atau beberapa investor. Tidak terkecuali bagi perusahaan *start-up* yang sedang dan akan terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Dalam beberapa hal tertentu, dapat dikatakan terdapat karakteristik yang berbeda antara perusahaan *start-up* dan perusahaan konvensional lainnya. Dalam perusahaan *start-up*, ide serta gagasan senantiasa dibakar untuk dapat terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus terdisrupsi seiring dengan perkembangan era digital.

Penulis tidak menyatakan bahwa perusahaan konvensional tidak memiliki spirit seperti itu, akan tetapi intensitasnya sudah tentu tidak secepat perusahaan *start-up*, yang memang bekerja mengikuti pola digital itu sendiri.

Oleh karenanya, orisinalitas ide dan tata cara kerja tertentu dalam dapur pacunya, tentunya menjadi sesuatu hal yang patut dijaga kerahasiaannya agar tidak ditiru dan dicuri oleh *start-up* lainnya. Namun sayangnya, sejumlah regulasi yang ada dalam hal mengatur perusahaan *start-up* setelah melakukan IPO, mengharuskan untuk mempublish beberapa datanya.

Walaupun di sisi lain, terkait prinsip transparansi dan syarat-syarat tertentu lainnya yang diperlukan dalam proses IPO Bursa Efek Indonesia, tentunya merupakan suatu keniscayaan, mengingat yang dikelola adalah dana publik yang berasal dari masyarakat, dan praktik yang selama ini dijalankan terhadap perusahaan konvensional memang begitu adanya.

Akan tetapi hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri oleh para pemangku kebijakan, jika mengingat besarnya nilai valuasi yang dimiliki para *unicorn* Indonesia, beserta manfaatnya bagi perekonomian nasional, sehingga perlu untuk 'dijinakkan' segera agar tidak kemudian berlari menjauhi Indonesia dan menetap di negara lain yang lebih mendukung ekosistem investasi perusahaan *start-up*.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah seorang peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute dan dapat dihubungi melalui:

Auliaan@theindonesianinstitute.com

Artikel ini bersumber dari <https://www.theindonesianinstitute.com/pejuang-dan-tantangan-ekonomi-digital/>

Riwayat Danau Tondano, Dulu & Kini

Oleh **DENNI PINONTOAN**

Di masa lalu, Danau Tondano dikagumi karena keindahannya, di masa kini keindahan itu hilang karena tutupan eceng gondok yang semakin luas

Johann Friedrich Riedel, *Zendeling* besar dari Jerman itu, ketika pertama kali mengunjungi Tondano, pertama-tama yang mengesankan dia adalah sebuah danau yang indah. Danau Tondano. Itu pada tahun 1831.

“Di depan kami terbentang danau biru Tondano. Dikelilingi oleh pegunungan hijau di setiap pemandangan,” ungkap Riedel ketika pertama kali melihat danau itu. Reinhold Grundemann merekam pengalaman Riedel itu dalam bukunya Johann Friedrich Riedel: *ein Lebensbild aus der Minahassa auf Celebes* (Gütersloh: C. Bertelsmann) terbit tahun 1873.

Foto: Freddy Pattiselano

Riedel tampaknya menggambarkan sebuah danau yang masih bersih dan alamiah. Alam sekitar berupa perbukitan dan pegunungan yang hijau tentu menambah pesona danau ini ketika dilihat orang untuk pertama kalinya.

Kira-kira seratus tahun kemudian, 1930-an, danau Tondano relatif masih menampilkan keindahan yang sama. Danau Tondano identik dengan keseluruhan nama Tondano itu sendiri.

“Jika berada di Tondano tidak pergi ke danau Tondano, sulit mengatakan sudah mengunjungi tempat ini,” tulis koresponden *De Indische Courant* yang dimuat pada edisi terbitan 25 Mei 1937.

Danau Tondano, seperti ditulis sang koresponden, mudah dijangkau. Danau Tondano digambarkan secara indah dan segar.

“Di depan kami terbentang danau biru Tondano. Dikelilingi oleh pegunungan hijau di setiap pemandangan,” ungkap Riedel ketika pertama kali melihat danau ini. Kini, pencemaran akibat limbah buangan rumah tangga dan tumbuhan eceng gondok yang menyelimuti birunya danau Tondano, perlahan memupus pesona danau ini.

Bersepeda atau berjalan kaki di sekitar danau sungguh sebuah pengalaman yang menyenangkan.

“Seseorang dapat dengan mudah berjalan atau bersepeda di tempat ini. Di sepanjang pinggiran danau orang dapat melakukan perjalanan yang menyenangkan,” jelas sang koresponden.

Di masa itu tidak banyak terlihat orang-orang berperahu atau berenang di pinggiran danau. Orang-orang Minahasa kebanyakan tinggal di lereng-lereng gunung. Jika seseorang sedang melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, dan singgah sebentar di tepi danau ini, pasti akan merasakan kelegaan. Orang seperti, “menemukan sepotong keindahan alam yang memenuhi harapan,” tulisnya.



Kalau dulu eceng gondok diperlakukan sebagai tanaman hias, di danau Tondano kini ia adalah masalah. Pendangkalan danau, dan kerusakan ekosistem berhubungan dengan keberadaan eceng gondok yang sulit terkendali.

Laporan ini menggambarkan kehidupan orang-orang Tondano di masa itu. Disebutkan, kebanyakan mereka tinggal di lereng-lereng gunung. Rumah-rumah mereka sangat sederhana. Pada sisi lain terhampar dataran yang luas. Di bagian tertentu terdapat sawah-sawah yang ditanami padi.

Selain Tomohon, menurut laporan si koresponden, Tondano layak untuk dijadikan tempat liburan. Terdapat sungai, alun-alun dan beberapa bangunan kantor pemerintah yang indah. Sebuah hotel yang dikelola oleh orang Eropa menjadi tempat penginapan bagi mereka yang melakukan kunjungan singkat atau yang sedang dalam perjalanan.

Satu abad sebelumnya, Tondano pernah hancur karena perang hebat pada tahun 1808-1809. Ini yang disebut Perang Tondano. Tidak lama setelah perang, Inggris datang menjajah wilayah ini. Pada tahun 1806, sebelum perang kapal Inggris sudah berlabuh di pelabuhan Manado.

Eceng Gondok Kini

Belum sampai 1 abad dari tahun 1930-an itu, kini danau Tondano dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Eceng gondok merajalela di danau ini. Tidak diketahui dengan pasti kapan pertama kali eceng gondok didatangkan dan bertumbuh di danau ini. Sebab, eceng gondok bukanlah tanaman asli di sini.

Sebuah literatur berbahasa Belanda yang ditulis K. Kemerlieng berjudul *Leerboek der Plantkunde voor Nederlandsch-indie* terbit tahun 1915 menjelaskan tentang jenis tanaman ini. Kemerlieng menulis, tanaman ini bukan asli

Hindia Belanda atau nusantara. Asalnya dari Amerika Selatan tetapi dapat tumbuh subur di daerah tropis macam Indonesia.

Di Indonesia, menurut Kemerlieng ketika dibawa ke sini, ia hanya dibudidayakan di *Lands Plantentuin te Buitenzorg* atau Taman Botani di Bogor. Sebuah gambar eceng gondok ditampilkan di bukunya itu yang diberi keterangan 1894. Dari Bogor ia kemudian menyebar melalui sungai dan hidup subur di danau-danau.

Di masa Kemerlieng menerbitkan bukunya tahun 1915, eceng gondok sudah bertumbuh di beberapa tempat secara liar dan menjengkelkan. Daya tumbuh eceng gondok sangat tinggi. Cepat sekali berkembang biak. Di Australia, kata Kemerlieng, eceng gondok telah menjadi masalah.

Kalau dulu eceng gondok diperlakukan sebagai tanaman hias, di danau Tondano kini ia adalah masalah. Pendangkalan danau, dan kerusakan ekosistem berhubungan dengan keberadaan eceng gondok yang sulit terkendali.

Entah sejak kapan tepatnya eceng gondok telah menjadi salah satu penyebab pendangkalan atau pengecilan danau ini. Majalah Tempo edisi 9 Mei 1981 melaporkan meluapnya danau Tondano. Judul beritanya memberi kesan kontras dengan memori orang-orang Minahasa tentang Danau Tondano. "Danau Tondano Tak Lagi Cantik" demikian judul majalah itu.

Faktor penyebab meluapnya Danau Tondano di tahun 1981 itu yang disebutkan adalah pengundulan hutan. Eceng gondok belum disebutkan sebagai faktor penyebab. "Hutan di sebelah timur danau yang semula menghias Pegunungan Lembean, telah disulap oleh penduduk Kecamatan Eris dan Kombi menjadi perkebunan cengkik. Hutan-hutan di Gunung Tampusu dan Lengkoan di sebelah barat danau juga nyaris punah," tulis Tempo.

Pencemaran sungai Tondano juga sudah disebutkan sebagai salah satu masalah waktu itu. Sejak pertengahan tahun 1970, disebutkan Tempo berdasarkan wawancaranya dengan penjaga pintu air PLTA, sungai danau Tondano telah dicemari oleh sampah-sampah rumah tangga. Selain sampah-sampah rumah tangga, longsor dari Gunung Tampusu dan Lembean

“Danau Tondano kini bukan lagi danau yang cantik dan jinak. Tidak pula menjadi kebanggaan sebagaimana disebut dalam lagu-lagu rakyat Minahasa. Dulu danau ini menghasilkan ikan mujair dan payangka”

yang terjadi setiap musim hujan disebut sebagai penyebab endapan lumpur yang mencapai sekitar 2 meter.

“Danau Tondano kini bukan lagi danau yang cantik dan jinak. Tidak pula menjadi kebanggaan sebagaimana disebut dalam lagu-lagu rakyat Minahasa. Dulu danau ini menghasilkan ikan mujair dan payangka,” tulis Tempo di tahun 1981 itu.

Euthalia Hanggari Sittadewi dalam penelitiannya tahun 2008 menemukan bahwa luas perairan danau Tondano, jika musim kemarau 46 km², pada penghujan 51 km². Luas keliling, dalam kondisi normal mencapai kurang lebih 35,5 km. Pendangkalan terus terjadi di danau ini. Pada tahun 1934 kedalamannya mencapai 40 meter, tahun 1974 kedalamannya 28 meter. Tahun 1983 27 meter; tahun 1992 16 meter, dan tahun 1996 kedalaman danau 15 meter.

Sittadewi menjelaskan, pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat telah menutupi lebih kurang 20% dari luasan danau yang terkonsentrasi di daerah sekitar pemukiman penduduk dan perikanan tancap. Eceng gondok, tanaman lain serta fauna yang mati akan menjadi sedimen, makin lama makin stabil dan menjadi padat. Jika hal tersebut diatas tidak dikendalikan, maka kondisi trofik Danau Tondano akan segera mencapai distrofik atau kehilangan ekosistem danau (suksesi ekosistem danau),” jelas Sittadewi.

Penelitian lain menyebutkan, tahun 2006 luas sebaran eceng gondok 130,77 hektar atau 2,82%. Pada tahun 2011 meningkat menjadi

292,66 hektar atau 6,32%. Itu berarti selama periode 2006-2011 luas sebaran eceng gondok meningkat 161,89 ha dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 32,38 hektar.

Dari 840 danau di Indonesia, 15 di antaranya dalam keadaan memprihatinkan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat 15 danau prioritas di Indonesia yang memerlukan pengawasan karena kerusakannya yang cukup parah. Salah satunya adalah Danau Tondano.

Tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan, sejumlah danau dan waduk di Indonesia yang telah ditumbuhi oleh eceng gondok dan telah menimbulkan masalah. Di antaranya Danau Rawa Pening, Danau Toba, Danau Kerinci, Danau Limboto, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Sentani, Waduk Saguling, Waduk dan Bendung Curug.

Sejak zaman kolonial sungai Tondano telah dimanfaatkan untuk penyediaan listrik. Air sungai ini menggerakkan turbin-turbin PLTA. Namun dahsyatnya pertumbuhan eceng gondok memberi dampak kurang baik bagi PLTA. “Saat ini kehadiran eceng gondok telah menimbulkan gangguan pada kegiatan PLTA serta lalu lintas danau. Untuk kestabilan kegiatan PLTA, sekitar 40 kubik eceng gondok harus dikeluarkan dari Danau Tondano setiap hari,” ungkap J. Nebath K dalam laporan penelitiannya berjudul “Kelimpahan Tumbuhan Akuatik di Danau Tondano” yang dipublikasikan Oktober 2008.

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi penyebarluasan eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian juga sudah banyak sekali. Baik hasilnya adalah rekomendasi cara mengatasi pertumbuhan atau bahkan usulan pemanfaatan eceng gondok sebagai alternatif menyelamatkan Danau Tondano dari pendangkalan atau kerusakan yang lebih parah. Namun tampaknya belum banyak hasil yang menggembirakan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini telah dimuat di:

<https://kelung.com/riwayat-danau-tondano-dulu-dan-kini/>

Oleh **NADYA KARIMA MELATI**

Apa yang Perlu Diketahui Tentang Dasar-Dasar Feminisme

Banyak orang yang bertanya kepada saya, jika ingin mempelajari feminisme dan kajian gender, dari mana harus memulai? Untuk itu saya membuat tulisan ini sebagai pengantar untuk memulai belajar soal feminisme.

Banyak orang yang bertanya kepada saya, jika ingin mempelajari feminisme dan kajian gender, dari mana harus memulai? Untuk itu saya membuat tulisan ini sebagai pengantar untuk memulai belajar soal feminisme.

Feminisme yang biasa saya ajarkan di kelas adalah sebuah paradigma, sebuah pemahaman komprehensif tentang keadilan berbasis gender yang bisa menjadi pijakan untuk pemikiran, gerakan, maupun kebijakan. Saya mengelompokkan feminisme dalam tiga spektrum, yakni sebagai gerakan sosial, alat analisis, dan ilmu pengetahuan, dan ketiganya saling melengkapi. Nyaris tidak mungkin menemukan pemikir feminis yang tidak berkecimpung dalam sebuah organisasi feminis, begitu pula jika ada aktivis pergerakan feminis yang tidak paham dasar-dasar teori feminisme sebagai ilmu pengetahuan ataupun alat analisis. Pada kesempatan ini, saya hanya akan membahas satu spektrum yakni feminisme sebagai ilmu pengetahuan sedangkan untuk sisanya akan dibahas dalam tulisan selanjutnya.

Pengantar Memahami Feminisme

Apakah feminisme selalu tentang perempuan? Pada awal kemunculannya, ya. Feminisme digunakan sebagai nama untuk

Ilustrasi: Ichsan Djunaed

sebuah gerakan sosial yang mengusung tentang hak-hak perempuan di Seneca Falls, New York, pada tahun 1848 oleh Elizabeth Cady Stanton dan kawannya, Susan B. Anthony. Mereka adalah duo pertama yang direkam sejarah melakukan pengorganisasian gerakan sosial perempuan di abad ke-19 yang berjuang untuk penghapusan perbudakan di Amerika Serikat dan hak perempuan untuk memilih. Gerakan ini kemudian disebut sebagai feminisme gelombang pertama.

Satu abad berikutnya, perjuangan pergerakan perempuan bernapas dalam ideologi sosialisme yang diusung oleh feminis Eropa seperti Clara Zetkins, Rosa Luxemburg dan Emma Goldman. Semangat feminisme dan pembebasan terhadap perbudakan dan penjajahan kemudian menular ke negara-negara Asia dan Afrika yang berada di bawah penjajahan beberapa negara Eropa pada awal abad ke-20.

Pemikiran tentang hak-hak perempuan mendapat pengaruh dari munculnya pemikiran Abad Pencerahan tentang individu, negara, dan hak asasi warga negara. Pada abad yang sama, Indonesia masih berupa wilayah kerajaan-kesultanan dan kesadaran tentang sebuah bangsa belum terbentuk. Setelah tahun 1900an, muncul ide tentang bangsa dan kebebasan dari penjajahan yang nantinya hadir dalam benak para pendiri bangsa Indonesia. Adalah tokoh feminis R.A. Kartini dalam surat-suratnya yang dibukukan berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang* yang memberikan fondasi awal tentang imajinasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Buku tersebut menjadi bacaan wajib dan merupakan kurasi dari surat menyurat Kartini dengan Stella Zeehandelaar, seorang feminis sosialis dari Belanda.

Mengapa penting untuk menyebut Stella dan Belanda dalam pemahaman dasar tentang feminisme? Karena ketika paham sosialisme menyeruak di parlemen Belanda pada akhir abad ke-17, muncul tokoh-tokoh liberal dan sosialis yang menentang penjajahan terhadap bangsa negara. Maka tuduhan bahwa feminisme adalah ideologi dari Barat menjadi tidak relevan karena jika tidak ada pertukaran ide dan gagasan tentang “bebas dari penindasan dan hidup yang layak sebagai seorang manusia”, maka Indonesia tidak pernah lahir. Indonesia lahir karena ada pertukaran dan dialog antar feminis yang

menyadari posisinya sebagai manusia dan keperempuanan, serta pikiran tentang kebebasan dan keadilan.

Feminisme masuk dalam kategori pemikiran modern yang berarti alat analisis feminisme akan menyangkut posisi perempuan dan posisinya sebagai warga negara. Layaknya setiap pemikiran, feminisme punya asumsi dasar yang tidak bisa diganggu gugat, perempuan tertindas. Untuk itu alat analisis dan konteks sosial dibutuhkan untuk mencurigai mengapa dan bagaimana perempuan tertindas. Dari asumsi tersebut pula akan muncul “*Women’s Question*” yang menjadi acuan para feminis untuk menganalisis lingkungan dan ketidakadilan serta memproyeksikan gerakan sosial.

Pemikiran modern lekat dengan pemikiran ideologi seperti Liberalisme, Marxisme, Sosialisme, dan lain-lain, tetapi feminisme bukan berusaha menjadi antitesis ataupun imitasi dengan tambahan kata “perempuan” dari pemikiran yang telah ada sebelumnya.

Feminisme mempunyai epistemologinya tersendiri untuk menganalisis. Maka, label untuk “feminis liberal” atau “feminis radikal” tidak digunakan sebagai patokan mutlak, apalagi menjadi identitas tersendiri. Label-label digunakan untuk mengkategorisasikan pemikiran ataupun ciri dari gerakan supaya mudah dikenali. Beragam pemikiran feminisme juga sering menimbulkan kontradiksi satu sama lain, misalnya dalam isu pornografi atau aborsi. Namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadikan feminisme monolitik, justru saling melengkapi dan kaya karena setiap perempuan juga beragam dan punya kondisi yang berbeda-beda.

Awalnya, kata perempuan ditujukan kepada jenis kelamin betina tetapi pada tahapan selanjutnya akan dibahas apa itu perempuan. Adalah feminis gelombang kedua yang berfokus pada individu dan menelaah *women’s question* menjadi lebih dalam yakni, “apa itu perempuan”. Dari hasil pergulatan tersebut, perempuan adalah sebuah kategori sosial akibat konstruksi masyarakat. Istilah jenis kelamin/gender banyak digunakan untuk menjabarkan bahwa penindasan terhadap perempuan memiliki spektrum perempuan sebagai ketubuhan dan sosial di mana keduanya ternyata saling berkelindan dan memengaruhi. Karenanya, kata

perempuan dalam feminisme perlahan berubah menjadi gender, begitu juga institusi-institusi pengetahuan seperti Kajian Wanita Universitas Indonesia yang berdiri tahun 1960 berubah menjadi Kajian Gender.

Indonesia lahir karena ada pertukaran dan dialog antar feminis yang menyadari posisinya sebagai manusia dan keperempuanan, serta pikiran tentang kebebasan dan keadilan.

Feminisme Sebagai Ilmu Pengetahuan

Saya merujuk pada buku-buku pemikir feminis Rosemarie Putnam Tong dengan sedikit modifikasi dari saya untuk mengelompokkan aliran feminisme di seluruh dunia dan sejarah yang melingkupinya, supaya pembaca bisa melihat bahwa pemikiran feminisme memang sangat lekat dengan ruang dan waktu. Aliran pemikiran feminis dibagi menjadi tiga gelombang, yakni gelombang pertama, kedua, dan ketiga, dan sebagaimana gelombang berarti aliran tersebut tidak berhenti di satu waktu. Aliran pemikiran itu terus ada dan bercabang bahkan kadang kontradiktif satu dengan lainnya. Pelabelan yang dilakukan dalam aliran gelombang adalah sekedar alat bantu, supaya lebih mudah untuk dipahami.

Feminisme Liberal tidak bisa dipisahkan dari pemikiran liberalisme tentang kebebasan sebagai tren pencerahan yang berkembang di Eropa pada abad ke-17. Revolusi Perancis merupakan letusan awal pengakuan individualisme dan aliran liberalisme adalah tonggak awal dalam pergerakan feminisme lainnya.

Sebuah esai yang ditulis oleh Mary Wollstonescraft tentang revolusi Borjuis Perancis dan hak-hak perempuan sebagai warga negara menjadi penanda awal kemunculan kajian tentang perempuan sebagai manusia yang hak-haknya harus dipenuhi sebagaimana semangat Revolusi Perancis yang menuntut individualisme dari monarki absolut Perancis. Disusul oleh tulisan Harriet Taylor dan John Stuart Mill di abad ke-17. Pencerahan dan revolusi ini dilakukan oleh para borjuasi yang menentang monarki dan mengedepankan individu, sehingga lekat dengan posisi kelas menengah atas yang mampu mengakses pendidikan dan membaca.

Kembali lagi pada konstelasi sejarah, letupan Revolusi Perancis berimbas pada perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya mendorong adanya Revolusi Industri di Inggris dan wilayah Eropa lainnya. Liberalisme dan pengakuan individu menghasilkan borjuasi yang melakukan penumpukan kapital melalui kerja dari manusia dengan kelas sosial yang lebih rendah. Di sini, kerja dan kelas sosial menjadi terfragmentasi semakin jelas dan penghisapan kerja menghasilkan pencemaran lingkungan bahkan eksploitasi terhadap anak dan perempuan. Situasi ini kemudian memunculkan aliran berikutnya.

Feminisme Marxis dan Sosialis hadir untuk menjawab kritik terhadap Revolusi Industri dan kapitalisme, kedua aliran feminis ini melihat bahwa kapitalisme hadir tidak hanya dalam proses produksi tetapi juga reproduksi sosial yang dibebankan kepada perempuan. Feminis Marxis memercayai bahwa segala ketidakadilan berpangkal pada kapitalisme dan Feminis Sosialis meyakini ada monster berkepala dua yang terus menggerus keadilan perempuan dalam masyarakat, yakni kapitalisme dan patriarki. Perkembangan selanjutnya dalam dunia adalah imperialisme dan kehadiran negara-negara baru, sehingga feminisme sosialis dan Marxis berfokus pada isu produksi dan reproduksi, bahwa terjadi pembagian kerja yang tidak adil secara gender dan perempuan dianggap sebagai ibu yang melakukan reproduksi sosial yang tidak dilihat sebagai kerja.

Feminisme Radikal dilatarbelakangi ketidakpuasan atas analisis feminis Sosialis dan Marxis, karena menurut mereka penindasan perempuan terjadi karena ketubuhan perempuan. Feminis Radikal berfokus pada tubuh, seksualitas, dan kepuasan yang bersinggungan dengan gerakan lesbianisme. Mereka ingin perubahan mendalam yang dimulai dari mencabut seluruh insitusi dari akarnya. Aliran feminis radikal dipecah menjadi Feminis Radikal Kultural (FRK) dan Feminis Radikal Libertarian (FRL). FRK mengagungkan keperempuanan dan kemampuan rahim perempuan menghasilkan kehidupan, dan bahwa hubungan seks heteroseksual adalah kekerasan terhadap perempuan. FRL, sementara itu, melihat sebaiknya perempuan tidak dibebankan lagi dengan reproduksi dan mereka menuntut adanya teknologi yang membuat rahim menjadi *portable*. FRL menekankan pada

androgini, bahwa maskulinitas dan feminitas harus dihargai sama dan berada dalam tubuh yang sama tanpa ada ide tentang perempuan sejati dan keperempuanan.

Feminisme Gelombang Kedua muncul setelah Perang Dunia II tahun 1940an. Kajian dan publikasi terkait perempuan senyap ditelan perang. Pada PD II perempuan mengambil alih tugas laki-laki di pabrik dan mencicipi bagaimana dunia publik. Sayangnya setelah perang selesai, dimulai propaganda untuk para perempuan kembali ke rumah. Gelombang kedua lekat dengan kehadiran kaum intelektual yang menentang perang dan melihat bagaimana perang dan penjajahan telah menghancurkan sebuah negara dan mengoyak-ngoyak hak asasi manusia.

Feminisme Eksistensial lahir dari kelompok intelektual, seperti di Perancis yang nanti melahirkan Simone de Beauvoir dan bukunya yang terkenal *The Second Sex*. Buku tersebut menjadi kanon karena berusaha menjawab apa itu perempuan melalui filsafat. Jawabannya adalah, perempuan tidak hanya biologis tapi juga sebuah kategori sosiologis. Feminisme eksistensial membuka cara pandang perempuan menjadi gender, sebuah terobosan yang nanti digunakan oleh kajian feminis selanjutnya.

Feminisme Psikoanalisis mencoba membaca mengapa perempuan “menjadi” perempuan melalui *psyche* atau kesadaran dan ketidaksadaran. Feminis psikoanalisis melihat bahwa perempuan memiliki cara kerja moral yang tidak dihargai oleh dunia (yang terlanjur) patriarkal. Feminis psikoanalisis percaya bahwa perempuan menjadi perempuan melalui kerja penalaran, pengambilan keputusan, dan apa yang dianggap adil bagi perempuan berbeda dengan yang pemikiran umum pikirkan tentang keadilan.

Feminisme Gelombang Ketiga hadir bersamaan dengan negara-negara Asia-Afrika yang telah melewati serangkaian perjuangan kemerdekaan. Kini, sejarah tidak selalu tentang Eropa Barat tapi muncul perspektif perempuan dari negara lain. Lahir setelah *Civil Rights Movement* dan penghapusan diskriminasi berdasarkan warna kulit, gelombang ketiga memunculkan apa yang disebut Feminisme Interseksional untuk melihat bahwa analisis gender harus dilengkapi dengan kelas sosial,

warna kulit, identitas seksual, dan konteks lokasi yang memengaruhi lapisan penindasan.

Feminisme Posmodern berusaha membedah epistemologi dan ilmu pengetahuan yang telah mapan dan mencurigai praktik-praktik kolonialisme yang masih bercokol dalam bentuk budaya. Feminis posmodern berangkat dari konsep liyan atau yang lain untuk disebut kembali dan dimaknai ulang sehingga muncul pemahaman baru. Feminisme posmodern percaya bahwa liyan mampu mengkritik struktur dominan dan membongkar praktik ketidakadilan yang telah menjadi fosil dalam kepala kita semua seperti diskriminasi terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), dan sebagainya.

Feminisme Multikultural/Global mencoba menyuarakan pengalaman berbeda dari tubuh dan negara yang berbeda. Bahwa dasar epistemologi feminisme adalah empirisme atau pengalaman perempuan dan nyatanya pengalaman perempuan selalu berbeda. Pengalaman perempuan Tionghoa hidup di Amerika Serikat dengan perempuan Tionghoa yang tinggal di China atau Indonesia sangat berbeda dan tidak bisa disamakan. Begitu juga perempuan muslim di negara-negara yang berbeda.

Feminisme Multikultural membuka suara terhadap feminisme teologi, di mana sebelumnya agama dipandang sebagai sistem patriarki sempurna, sehingga memberikan tafsir baru dari pengalaman perempuan dalam beragama yang berperspektif feminis.

Ekofeminisme populer di Indonesia sebagai aliran feminisme yang muncul akibat kerusakan sumber daya alam dan eksploitasi besar-besaran alam untuk industri. Ekofeminisme menekankan pada hubungan perempuan dan alam yang sama-sama menjadi korban perkosaan kapitalisme dan menekankan mistisisme dan legenda sebagai alat penjabarannya. Selain ekofeminisme ada pula Feminisme Ekologi yang melihat dampak kerusakan alam terhadap hubungan antar manusia yang bersandar pada kajian ekologi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Nadya adalah penulis dan peneliti sejarah dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia. Artikel ini dapat dibaca pada link <https://magdalene.co/story/yang-perlu-diketahui-tentang-dasar-dasar-feminisme>



Kegiatan di BaKTI

11 April 2019

Kelas Bimbingan Pengisian Formulir Beasiswa Australia Awards

Beasiswa Australia Awards telah dibuka sejak awal Februari hingga akhir April 2019. BaKTI bekerja sama dengan Ikatan Alumni Mahasiswa Australia (IKAMA) Sulawesi Selatan mengadakan Kelas Bimbingan Pengisian Formulir Beasiswa Australia Awards. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan BaKTI dan IKAMA. Antusiasme terhadap beasiswa ini sangat tinggi, terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 86 orang, terdiri dari mahasiswa, alumni serta dosen. Dua orang Alumni



Beasiswa Australia Awards hadir sebagai narasumber pada kelas tersebut, Ibu Siti Sahreny dan Ibu Sirmayanti. Mereka memaparkan poin-poin penting serta membahas hal-hal teknis dalam pengisian formulir yang diisi secara online.

12 April 2019

Sharing Session "Work and Holiday Visa"

Work and Holiday Visa – disingkat WHV – adalah salah satu program kerja sama antara Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Departemen Imigrasi Australia. Australia-Indonesia Youth Association (AIYA) Eastern Indonesia chapter Makassar bekerjasama dengan BaKTI, mengadakan *sharing session* perihal program tersebut. Dengan narasumber Rismawati Natsir sebagai Grantee dari program WHV membagikan pengalamannya



mulai hal teknis pendaftaran hingga non-teknis selama proses rekrutmen berlangsung kepada peserta yang hadir.

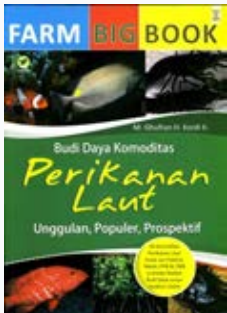
15 April 2019

Peluncuran Buku "Memetik Keberanian-Kumpulan buku cerita untuk anak-anak"

Perkumpulan IDEAKSI Indonesia telah menerbitkan sebuah kumpulan buku cerita anak-anak berjudul "Memetik Keberanian". Harapannya buku ini dapat menghilangkan trauma anak-anak sedikit demi sedikit, mengembalikan keceriaan mereka, dan membuat anak-anak kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bertempat di ruang pertemuan BaKTI, Perkumpulan IdeAKSI mengadakan launching dan diskusi buku tersebut. Buku ini juga dibagikan gratis ke pihak sekolah dan komunitas-komunitas dimana anak-anak terdampak gempa.



Hadir sebagai pembicara, Alwy Rahman (Akademisi Unhas), Nana Saleh dari IKAMA, dan Ghufuran H. Kordi K (Pemerhati anak) dan dimoderatori oleh Irmawaty Puan Mawar.



Budi Daya Komoditas Perikanan Laut Unggulan, Populer, Prospektif

PENULIS M. Ghufuran H. Kordi K

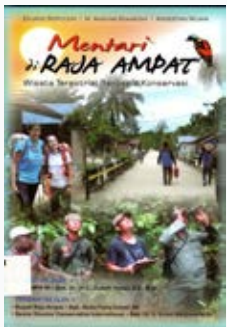
Potensi produk akuakultur atau budi daya perairan Indonesia diperkirakan mencapai 57,7 juta ton/tahun. Tahun 2016 produksi akuakultur Indonesia baru mencapai 19,4 juta ton. Angka tersebut masih sangat rendah. Apalagi produksi akuakultur Indonesia didominasi oleh rumput laut. Dari sisi produktivitas, petani ikan atau pembudidaya di Indonesia jua masih rendah. Buku ini menyajikan sebanyak 39 komoditas perikanan laut meliputi pasar, biologi, pembenihan, pendederan, dan pembesaran.



Politik dan Rekayasa Bahasa

PENULIS Sukardi Weda

Buku ini memuat sejumlah tulisan Sukardi Weda yang pernah dipublikasikan di sejumlah surat kabar dan majalah. Antologi tulisan ini merupakan tulisan lepas sang penulis terhadap peristiwa yang terjadi dari tahun 2009-2013, memuat berbagai bahasan mulai dari persoalan politik, gender, bahasa, hingga persoalan media.



Mentari di Raja Ampat: Wisata Terrestrial Berbasis Konservasi

PENERBIT Enjang Sopiudin, M. Ahdiyari Syahrony, Andestian Wijaya

Hampir seluruh informasi pariwisata Raja Ampat mengulas wisata bahari, padahal Raja Ampat masih menyimpan potensi wisata daratan (terrestrial) yang sangat besar untuk dikembangkan dan terintegrasi dengan wisata bahari yang telah ada serta mendunia. Wisata daratan berbasis konservasi bertujuan menempatkan konservasi alam atau lingkungan sebagai prioritas utama melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, dan masyarakat secara tidak langsung turut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.



Jurnal Perempuan Edisi 100: Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

PENERBIT Jurnal Perempuan

Dalam edisinya yang keseratus, Jurnal Perempuan mengangkat tema gerakan perempuan di Indonesia. Mulai dari gerakan subaltern untuk kedaulatan pangan oleh Komunitas Anti Tambang di Sumba, gerakan perempuan untuk keterwakilan politik perempuan, aksi kolektif perempuan untuk pemberdayaan di Indonesia, hingga gambaran gerakan perempuan politik setelah 20 tahun reformasi.